

TUGAS AKHIR

**EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PPh PASAL 21 TAHUN 2023:
STUDI KASUS PT CEPAT SAJI DENGAN PENDEKATAN *TAX REVIEW***



Disusun Oleh :

Erinda Aprillia

21212003

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Jenjang Sarjana Terapan Program Studi Akuntansi Perpajakan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Erinda Aprillia

21212003

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apa pun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 1 Juni 2025

Penulis



Erinda Aprillia

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :

Nama : Erinda Aprillia

Nim : 21212003

Program Studi : Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 07/05/2024

Dosen Pembimbing



(Dra. Marisati, S.E., M.Si, Ak. CA, Cert.SAP)

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN TERAPAN

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PPh PASAL 21 TAHUN 2023: STUDI KASUS
PT CEPAT SAJI DENGAN PENDEKATAN *TAX REVIEW*

Disusun Oleh :

Nama : Erinda Aprillia

Nim : 21212003

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

DOSEN PENGUJI

Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ph.D., Ak., CA



Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert.SAP.



MENGETAHUI,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – FAKULTAS BISNIS EKONOMIKA

KETUA PRODI DA AKUNTANSI PERPAJAKAN



Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert.SAP.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun laporan Tugas Akhir dengan baik dan lancar. Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Evaluasi Sistem Pengelolaan PPh Pasal 21 Tahun 2023: Studi Kasus PT Cepat Saji Dengan Pendekatan *Tax Review*”** menguraikan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kantor Jasa Akuntansi PT. Akuntan Sinergi Profesional selama 6 bulan. Isi dari laporan ini mencakup hasil *tax review* terhadap penerapan perhitungan PPh Pasal 21 oleh salah satu klien KJA PT. Akuntan Sinergi Profesional.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini baik bantuan maupun dukungan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan tepat waktu.
2. Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert. SAP selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kaprodi Akuntansi Perpajakan yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan motivasi sehingga laporan ini dapat selesai tepat waktu.
3. M. Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA, BKP, CPA, CFrA selaku pemilik Kantor Jasa Akuntan PT. Akuntan Sinergi Profesional, yang telah memberikan peluang, akses, bantuan dan fasilitas yang mendukung dalam proses penulisan laporan akhir.
4. Pak Yudhi dan Bu Muji selaku kedua orangtua saya, Zaki Falah Qotrunnada selaku adik kandung saya, Ananda Yudha Prasetya dan Farah Asyfiya selaku kakak kandung dan kakak ipar saya, yang selalu

memberikan dukungan, doa, nasihat baik moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan lancar.

5. Dian Rachmasari, Wio Maulana, dan seluruh staf Kantor Jasa Akuntan PT. Akuntan Sinergi Profesional yang selalu memberikan dukungan, ilmu pengetahuan dan arahan yang baik, sehingga laporan ini dapat selesai dengan baik.
6. Wening Lulusanti dan Najma Fatya Risfana selaku teman magang saya yang selalu ada dan selalu mendukung dalam suka maupun duka.
7. Rosy, Maretha, Syades, Kinan, Laila selaku sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan cerita saya baik suka maupun duka.
8. Adinda Khansa, Devy, Melly, Enggar, Devita dan teman-teman Prodi Akuntansi Perpajakan yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam perjalanan dan proses penulisan ini.

Yogyakarta, 2 Juni 2025

Penulis



Erinda Aprillia

DAFTAR ISI

HALAMAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 PPh Pasal 21	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.2.2 Dasar Hukum Perhitungan PPh Pasal 21	9
2.2.3 Tarif perhitungan PPh Pasal 21	10
2.2.4 Unsur Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	10
2.2.5 Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21	12
2.3 <i>Tax Review</i>	13
2.4 Penelitian Terdahulu.....	15
2.5 Kerangka Konseptual	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.6.1 Evaluasi Kesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 dengan UU No. 36 Tahun 2008	21
3.6.2 Analisis Keselarasan Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan Perhitungan Pajak Menurut PT Cepat Saji	22
3.6.3 Evaluasi Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24

4.1	Data Umum Perusahaan	24
4.2	Data Khusus Perusahaan	25
4.3	Hasil dan Pembahasan	26
4.3.1	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan UU No. 36 Tahun 2008 26	
4.3.2	Analisis Keselarasan Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan Perhitungan Pajak	30
4.3.3	Evaluasi Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Implikasi Penelitian	41
5.3	Keterbatasan Penelitian	42
5.4	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		43
Lampiran		46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Progresif.....	10
Tabel 2. 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak	12
Tabel 4.1 Perhitungan PPh 21 Januari menurut PT Cepat Saji	27
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Januari menurut pajak	27
Tabel 4.3 Perbandingan perhitungan menurut PT Cepat Saji dengan Bukti Potong	30
Tabel 4. 4 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan januari.....	31
Tabel 4. 5 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Maret	32
Tabel 4. 6 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan April	32
Tabel 4. 7 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Mei	33
Tabel 4. 8 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Juni	34
Tabel 4. 9 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Juli	34
Tabel 4. 10 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Agustus	34
Tabel 4. 11 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan September.....	34
Tabel 4. 12 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Oktober.....	35
Tabel 4. 13 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan November	35
Tabel 4. 14 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Desember.....	37
Tabel 4. 15 Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2023	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Penerimaan Negara (Milyar)	1
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	18

DAFTAR LAMPIRAN

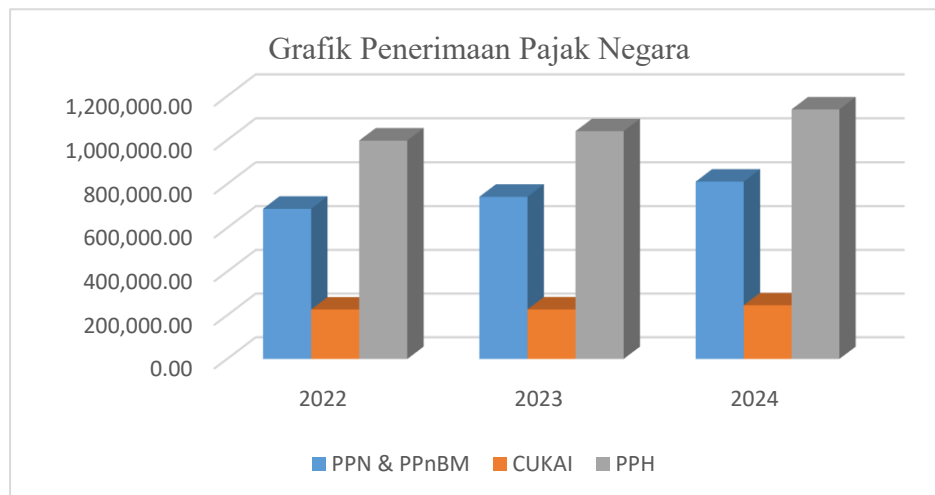
Lampiran 1: Data Gaji Pegawai dan Status Pegawai	46
Lampiran 2: Bukti Potong Bulan Januari.....	46
Lampiran 3: Bukti Potong Bulan Februari.....	48
Lampiran 4: Bukti Potong Bulan Maret.....	49
Lampiran 5: Bukti Potong Bulan April	50
Lampiran 6: Bukti Potong Bulan Mei.....	51
Lampiran 7: Bukti Potong Bulan Juni.....	52
Lampiran 8: Bukti Potong Bulan Juli.....	53
Lampiran 9: Bukti Potong Bulan Agustus	54
Lampiran 10: Bukti Potong Bulan September	55
Lampiran 11: Bukti Potong Bulan Oktober	56
Lampiran 12: Bukti Potong Bulan November	57
Lampiran 13: Bukti Potong Bulan Desember	58
Lampiran 14: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Januari	59
Lampiran 15: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Februari	60
Lampiran 16: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Maret	61
Lampiran 17: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan April	62
Lampiran 18: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Mei	63
Lampiran 19: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Juni	64
Lampiran 20: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Juli.....	65
Lampiran 21: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Agustus.....	66
Lampiran 22: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan September.....	67
Lampiran 23: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Oktober.....	68
Lampiran 24: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan November.....	69
Lampiran 25: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Desember	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anissa et al., 2024). Pajak mempunyai peran utama dalam kehidupan negara, yaitu salah satunya untuk penerimaan dana negara yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai pembangunan negara, seperti infrastruktur. Kesadaran oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tentunya akan memengaruhi tingkat tinggi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi persoalan yang sering terjadi. Fakta membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya di Indonesia masih tergolong cukup rendah (Lesmana et al., 2022).



Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Penerimaan Negara (Milyar)

Sumber : <https://www.bps.go.id/> (diolah penulis)

Berdasarkan data di atas yang dikutip dari laman www.bps.go.id dapat dibuktikan bahwa realisasi penerimaan pajak pada periode tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan dan cenderung pada klaster membaik. Pertumbuhan pada

penerimaan pajak tentunya tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Namun pada realitanya dilapangan masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga penting dilakukan adanya pengelolaan pajak pada suatu entitas agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya khususnya pengelolaan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai PT Cepat Saji.

Menurut Mardiasmo (2018), Pengelolaan pajak merupakan serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi entitas untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi secara efektif dan efisien. Terdapat komponen penting dalam pengelolaan pajak yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya dilakukan pengelolaan pajak yaitu untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan peraturan perpajakan, mengoptimalkan pembayaran pajak untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum, menyusun strategi perpajakan yang mendukung perencanaan keuangan jangka panjang, dan mengurangi risiko terkait sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan pajak.

Hal yang sama juga berlaku bagi PT Cepat Saji, sebagai perusahaan yang memiliki jumlah pegawai tetap yang cukup banyak yaitu sekitar 60 pegawai, perusahaan ini perlu memiliki sistem pengelolaan pajak yang terstruktur dan profesional agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan pajak yang baik tidak hanya mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi risiko sanksi administratif akibat kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak.

PT Cepat Saji memiliki tanggung jawab untuk memotong pajak karyawan dengan benar, sehingga jumlah pajak yang dipotong agar tidak berlebihan maupun kurang dari yang seharusnya dibayarkan (Tambunan & Gani, 2024). Secara umum, karyawan tetap memperoleh penghasilan dari pihak pemberi kerja, yang

biasanya berupa gaji atau upah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, komponen gaji atau upah bagi karyawan tetap mencakup upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya, insentif, serta bonus. Seluruh komponen penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif progresif.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No : PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis PPh pasal 21/26, untuk menghitung penghasilan kena pajak terdapat dua komponen yaitu komponen penambah penghasilan dan komponen pengurang penghasilan. Untuk komponen penambah penghasilan yaitu terdiri dari gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (asuransi kesehatan yang dibayar perusahaan). Sedangkan untuk komponen pengurang gaji yaitu terdiri dari biaya jabatan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Selain itu pegawai juga mendapatkan tambahan pengurang gaji dari status pegawai yaitu apabila pegawai tersebut menikah dan mempunyai tanggungan yang biasanya dikenal dengan istilah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (Wibawa et al., 2024). Sesuai dengan ketentuan perpajakan, Wajib Pajak dengan penghasilan neto yang tidak melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam menghitung pembayaran pajak, perusahaan mungkin menghadapi perbedaan antara hasil perhitungan internal yaitu menurut PT Cepat Saji dengan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu pada UU No 36 Tahun 2008 (Haryanto et al., 2021). PT Cepat Saji sebagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai tetap tentu memiliki kewajiban dalam pengelolaan PPh Pasal 21. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara perhitungan internal perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut melalui pendekatan *tax review*. Untuk mengatasi hal tersebut Wajib Pajak dapat melakukan *tax review* untuk melihat kepatuhannya terhadap undang-undang.

Pada kegiatan *tax review* ini dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan

itu sendiri yaitu PT Cepat Saji maupun secara eksternal dengan menggunakan jasa pihak ketiga, seperti konsultan pajak. Dalam kasus PT Cepat Saji, proses *tax review* dilakukan oleh pihak eksternal yaitu menggunakan jasa konsultan KJA PT Akuntan Sinergi Profesional. Dalam kegiatan ini, seluruh aspek perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan dinilai sehingga dapat ditentukan apakah perusahaan sudah patuh atau masih terdapat kewajiban yang harus segera diselesaikan khususnya pada pajak penghasilan pasal 21.

Tax review memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengevaluasi potensi kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan (Widyawati & Sudiana, 2022). Lebih lanjut, kegiatan *tax review* ini juga bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya *tax exposure* berupa ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban pajak dan untuk melakukan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan perusahaan (Oktaviani & Apriliawati, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Cepat Saji dengan menggunakan pendekatan *tax review*. Fokus penelitian ini mencakup perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta efektivitas pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada perusahaan PT Cepat Saji dengan judul “**Evaluasi Sistem Pengelolaan PPh Pasal 21 Tahun 2023: Studi Kasus PT Cepat Saji Dengan Pendekatan Tax Review**” Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi PT Cepat Saji dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan PPh Pasal 21.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT Cepat Saji sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 ?
2. Apakah pelaporan PPh Pasal 21 pada bukti potong PPh Pasal 21 sudah

sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 PT Cepat Saji?

3. Apakah pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 oleh PT Cepat Saji telah dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Cepat Saji dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian pelaporan PPh Pasal 21 pada bukti potong yang diterbitkan oleh PT Cepat Saji dengan hasil perhitungan PPh Pasal 21, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak.
3. Untuk menilai ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Cepat Saji, serta memastikan bahwa pelaporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan dari penelitian ini mampu dijadikan sumber pedoman dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi, terutama yang berhubungan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman penulis terkait manfaat *tax review* pada pajak penghasilan pasal 21 serta analisis tingkat kepatuhan pajak pada suatu entitas, dengan mengimplementasikan ilmu dan sejumlah teori yang diperoleh

pada masa perkuliahan di FBE Universitas Islam Indonesia.

b. Bagi Pihak Perusahaan

Diharapkan dari analisis maupun hasil temuan pada penelitian ini dapat memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengoptimalkan kinerja perhitungan pajak penghasilan pada PT Cepat Saji khususnya pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, Dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pembenahan guna menghindari kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan koleksi bahan pustaka bagi Universitas Islam Indonesia, yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang sedang mempelajari materi yang serupa sehingga dapat memberikan tambahan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Bagi pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberika pemahaman yang mendalam bagi pembaca terkait perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang ditinjau dari *tax review* pajak penghasilan pasal 21 pada suatu entitas.

1.5 Sistematika Pembahasan

Supaya dapat memudahkan penulis dan pembaca, laporan tugas akhir ini dibagi dalam lima bab. Sistematika penyusunan laporan ini mencakup:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 1 akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab 2. Kajian Pustaka

Pada bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

Bab 3. Metode penelitian

Bab ini akan menguraikan mengenai desain penelitian yang akan digunakan, desain penelitian terapan, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab 4. Hasil penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penjelasan hasil penelitian yang didasarkan dari sejumlah data yang sudah diperoleh disertai pembahasannya.

Bab 5. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *compliance theory* yang dikemukakan oleh Kelman (1958). Teori ini menjelaskan mengenai perilaku kepatuhan atau ketaatan individu terhadap aturan atau perintah yang berlaku. Menurut Kelman (1958), *compliance theory* merupakan suatu ketaatan yang berdasar pada harapan kepada suatu timbal balik dan upaya untuk menghindari dari sanksi yang akan diperoleh jika ketaatan itu tidak dijalankan. Kepatuhan pajak adalah tanggung jawab yang wajib dilengkapi oleh wajib pajak guna melaksanakan hak perpajakan serta tanggungan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak berdasar pada wawasan wajib pajak mengenai peranan perpajakannya, dengan tetap berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Kesadaran ialah bagian dari dorongan intrinsik yakni dorongan yang berpangkal pada individu itu sendiri dan dorongan ekstrinsik yakni dorongan yang bisa diperoleh bukan dari dalam pribadi itu sendiri, seperti motivasi dari fiskus atau petugas pajak agar kepatuhan pajak meningkat (Cahyani & Basri, 2022).

Penelitian ini menjadi relevan dalam menggunakan *compliance theory*, karena membahas evaluasi sistem pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Cepat Saji melalui pendekatan *tax review*, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menganalisis sejauh mana kepatuhan perusahaan dalam menghitung, memotong, dan melaporkan pajak karyawan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan, baik dari aspek internal (proses pengelolaan pajak) maupun eksternal (pengawasan dan regulasi perpajakan).

Dengan demikian, penggunaan *compliance theory* dalam penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk mengevaluasi sejauh mana PT Cepat Saji

telah memenuhi kewajiban perpajakannya serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif dan efisien.

2.2 PPh Pasal 21

Kajian pustaka pada sub bab PPh Pasal 21 pada penelitian ini menjelaskan mengenai: (1) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21; (2) Dasar Hukum Perhitungan PPh Pasal 21; (3) Tarif perhitungan PPh pasal 21; (4) Unsur Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21; (5) Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21.

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak yang berlaku bagi pegawai adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. PPh Pasal 21 adalah pajak yang harus dibayar oleh individu yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, yaitu pegawai atau karyawan. Pajak ini menjadi kewajiban bagi mereka untuk dibayarkan. Penghasilan yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada kompensasi atau balas jasa yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau layanan yang diberikan, yang meliputi gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, maupun bentuk imbalan lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh individu dari kegiatan pekerjaan, jasa, atau aktivitas lainnya, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait. PPh Pasal 21 ini dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Indonesia, dan dinamakan demikian karena diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (Tambunan & Gani, 2024).

2.2.2 Dasar Hukum Perhitungan PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 ini berdasarkan pada:

- a. UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.
- b. PMK RI No.101/PMK.010/2016
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

2.2.3 Tarif perhitungan PPh Pasal 21

Tarif perhitungan PPh Pasal 21 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Tarif Progresif

Penghasilan Mulai	-	Penghasilan Sampai	Batas	Tarif
0	-	60.000.000,00	60.000.000,00	5%
60.000.000,00	-	250.000.000,00	190.000.000,00	15%
250.000.000,00	-	500.000.000,00	250.000.000,00	25%
500.000.000,00	-	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	30%
5.000.000.000,00	-			35%

Sumber : UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

2.2.4 Unsur Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Dalam menentukan unsur penghasilan PPh Pasal 21 terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan (UU PPh) (sebagaimana diubah dengan UU HPP) berikut adalah unsur-unsur penghasilan yang termasuk dalam perhitungan PPh Pasal 21:

- a.) Gaji: Merupakan kompensasi rutin berupa uang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kesepakatan kerja yang berlaku.
- b.) Upah: Penghasilan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pekerja harian, mingguan, atau berdasarkan sistem borongan.

- c.) Tunjangan: Pendapatan tambahan yang bisa bersifat tetap maupun tidak tetap, seperti tunjangan makan, transportasi, perumahan, jabatan, maupun kinerja.
- d.) Honorarium: Imbalan yang diberikan atas jasa profesional atau kegiatan tertentu, misalnya kepada narasumber, konsultan, atau tenaga ahli.
- e.) Uang Lembur: Kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja reguler.
- f.) Bonus: Penghargaan finansial tambahan yang diberikan karena pencapaian target atau kinerja yang baik.
- g.) Gratifikasi: Pemberian uang atau barang sebagai bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih.
- h.) Komisi: Imbalan berbasis persentase dari hasil penjualan atau keuntungan yang diperoleh.
- i.) Premi Asuransi yang Ditanggung Perusahaan: Iuran asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan karyawan, di luar pembayaran kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- j.) Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan: Barang atau fasilitas yang diberikan kepada pegawai yang secara umum dikenakan pajak penghasilan, kecuali yang dikecualikan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- k.) Uang Pensiun, Pesangon, dan Penghargaan Masa Kerja: Pembayaran yang berkaitan dengan berakhirnya masa kerja karyawan, baik karena pensiun maupun pemutusan hubungan kerja.

Unsur-unsur pengurang penghasilan karyawan yang ditetapkan dalam penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-250/PJ/2009 dan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a) Biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari gaji pokok bruto yang diterima karyawan setinggi-tingginya 6.000.000 dalam satu tahun atau sebesar 500.000 dalam satu bulan.

- b) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% di mana ada pembagiannya yaitu 3,7% dibayarkan oleh pemberi kerja dan tidak dapat menjadi penambah pada saat perhitungan pajak penghasilan kemudian 2% yang dibayarkan oleh tenaga kerja dapat menjadi pengurang penghasilan pada saat perhitungan pajak penghasilan.
- c) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/ PMK.010/ 2016 yang dikeluarkan pada 27 Juni 2016. Hal ini juga yang menjadi dasar ketentuan gaji minimum kena pajak 2023, yang menyebutkan bahwa pendapatan sebesar Rp54.000.000 dalam setahun atau Rp4.500.000 dalam sebulan merupakan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri sendiri (Masdar, 2023). Berdasarkan pasal 11 101/PMK.010/2016 besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP	NOMINAL
TK/0	54.000.000,00
TK/1	58.500.000,00
TK/2	63.000.000,00
TK/3	67.500.000,00
K/0	58.500.000,00
K/1	63.000.000,00
K/2	67.500.000,00
K/3	72.000.000,00

Sumber : PMK RI No. 101/PMK.010/2016

2.2.5 Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Pemotongan pajak sendiri bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memotong pajak yang terhutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan pajak yang harus dibayarkan tersebut dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran terhadap pihak yang menerima penghasilan (Winarsih, 2022).

Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Praktik peraturan pajak di Indonesia ini menggunakan *self assessment system* yang berarti Wajib

Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaporan pajak ini dibutuhkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) (Winarsih, 2022). Sedangkan pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Pada pemotongan PPh Pasal 21 PT Cepat Saji menggunakan *withholding system*. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut (Winarsih, 2022).

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Pasal 24, batas penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pihak pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap periode pajak wajib disetorkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 2) Pihak yang memotong PPh Pasal 21 berkewajiban untuk melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut setiap masa pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong tersebut terdaftar, dengan batas waktu maksimal 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

2.3 Tax Review

Pada sub bab *Tax Review* pada penelitian ini menjelaskan mengenai: (1) Pengertian *Tax Review*; (2) Tujuan *Tax Review*; (3) Prosedur *Tax Review*.

2.3.1 Pengertian *Tax Review*

Tax review merupakan upaya pemeriksaan terhadap seluruh transaksi perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Hasil *tax review* akan memunculkan rekomendasi atau bahkan peringatan terhadap potensi pajak yang mungkin timbul di kemudian hari. Sehingga perusahaan dapat menentukan langkah apa yang akan diambil

dengan mempertimbangkan sejauh mana potensi itu mungkin terjadi dan berapa besaran pajak yang akan di tanggung (Oktaviani & Apriliawati, 2021). Kegiatan *tax review* termasuk memeriksa dan mengevaluasi apakah suatu perusahaan telah memenuhi tanggung jawab pajaknya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan (Widyawati & Sudiana, 2022).

2.3.2 Tujuan *Tax Review*

Tujuan dilakukan *tax review* ini adalah untuk mengidentifikasi apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak sinkron dengan prosedur perpajakan sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku guna meminimalisir sanksi administrasi akibat pemeriksaan pajak atau ketidakpatuhan perpajakannya.

2.3.3 Prosedur *Tax Review*

Prosedur yang dilakukan dalam *tax review* PPh Pasal 21 mencakup langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data hasil perhitungan PPh Pasal 21 PT Cepat Saji, Bukti potong PPh Pasal 21 tahun 2023, SPT masa Januari sampai Desember tahun 2023.
2. Mengidentifikasi kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 PT Cepat Saji dengan UU No 36 Tahun 2008.
3. Mengidentifikasi kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 PT Cepat Saji dengan Bukti Potong.
4. Mengidentifikasi kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 PT Cepat Saji dengan SPT SPT masa Januari sampai Desember tahun 2023.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3 Peneliti Terdahulu

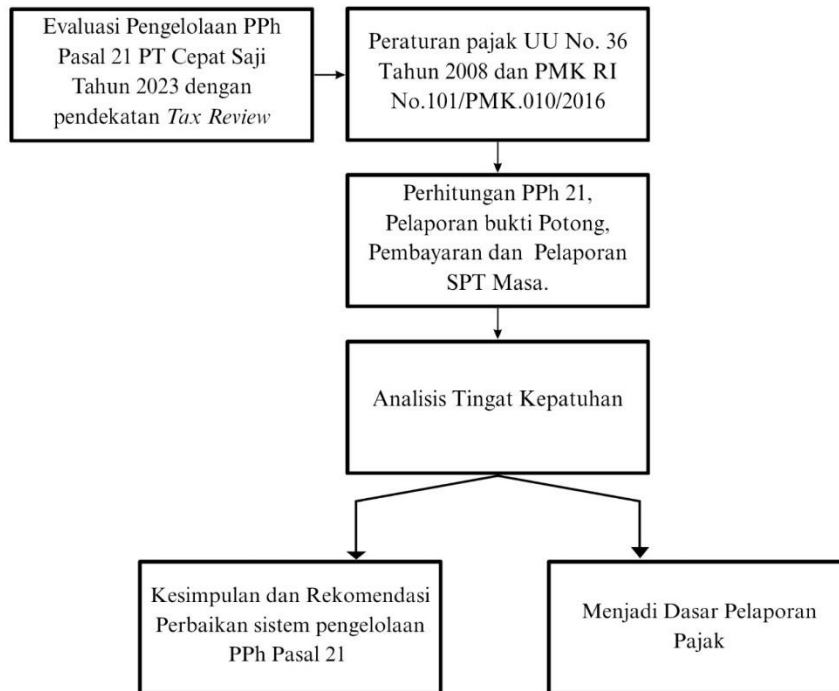
Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
(Maghfirah et al., 2021)	“Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT Bantimurung Indah”	Metode kualitatif, menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian.	Penyetoran pajak sering mengalami keterlambatan. Selain itu, pelaporan pajak menggunakan SPT yang diambil di Kantor Pelayanan Pajak, dan keterlambatan penyetoran menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan.
Tambunan & Gani (2024)	“Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia”	Wawancara (data primer) dan dokumentasi (data sekunder)	Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Sagami Indonesia belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, menyebabkan selisih perhitungan dan lebih bayar pajak.
Kurniyawati (2019)	“Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya”	Metode deskriptif dengan analisis data dan perbandingan regulasi	Perhitungan PPh Pasal 21 di PT. X tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, menyebabkan lebih bayar pajak akibat kurang teliti dalam perhitungan dan status pegawai.

Fitriah & Herviana (2021)	<p>“Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK RI No. 101/PMK.010/2016 Pada Karyawan CV Nusantara Teknik Di Kabupaten Berau”</p>	<p>Metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif</p>	<p>CV Nusantara Teknik tidak memasukkan unsur THR dan iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga terjadi kurang bayar pajak.</p>
Masdar (2023)	<p>“Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pegawai Tetap Pada Perumda Air Minum Kota Makassar”</p>	<p>Pendekatan kualitatif (observasi, wawancara, dokumentasi)</p>	<p>Perhitungan PPh Pasal 21 pada Perumda Air Minum Kota Makassar telah sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021, dengan kenaikan tarif progresif.</p>
Anissa (2024)	<p>“Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021”</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif (observasi, wawancara, dokumentasi)</p>	<p>PP No. 58 Tahun 2023 memberikan dampak positif dengan penurunan pajak terpotong dan kenaikan penghasilan karyawan, serta penyederhanaan perhitungan pajak bagi perusahaan.</p>
Winarsih (2022)	<p>“Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)</p>	<p>Pendekatan kualitatif (wawancara dan dokumentasi)</p>	<p>Perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di Kanwil VI PT Pegadaian Makassar telah</p>

	Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar)”		sesuai dengan Per- 16/PJ/2016.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------

2.5 Kerangka Konseptual

PT Cepat Saji merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Fast Food Restaurant*, dengan produk unggulan, *Fried chicken, Burger, Steak* dan *Chinese food*. PT Cepat Saji berdiri sekitar tahun 2010, dan mulai membuka kemitraan untuk mendorong pengusaha-pengusaha baru dengan modal yang terjangkau sehingga memiliki suatu usaha bidang makanan yang dapat dikelola oleh perorangan atau berbadan hukum. Gerai-gerai PT Cipta Rasa telah tersebar di beberapa kota di Indonesia. PT Cepat Saji merupakan perusahaan yang cukup besar, yang memiliki kurang lebih 1700 pegawai pada seluruh outletnya sehingga memiliki potensi pajak PPh Pasal 21 atas pegawai. Karena jumlah pegawai yang cukup banyak sehingga perlu dilakukan analisis terkait perhitungan, pemotongan dan pelaporannya untuk menguji tingkat kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Sehingga apabila ditemukan kesalahan maka dapat dijadikan bahan evaluasi, perbaikan sistem dan pembedulan perhitungan pajaknya. Untuk gambaran yang lebih jelas, penulis menyusun alur pemikiran berdasarkan sistematika dan alat analisis yang digunakan dalam menyelesaikan masalah berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Gambar di atas bisa dilihat bahwa PT Cepat Saji merupakan objek penelitian yang menerbitkan bukti perhitungan PPh 21, bukti potong, dan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). Ketiga objek tersebut menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan analisis untuk menguji kepatuhan baik perhitungan maupun pelaporan PPh Pasal 21 oleh PT Cepat Saji. Tidak hanya analisis, melainkan pembetulan apabila nantinya ditemukan kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian Terapan

Jenis desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data kuantitatif berupa gaji pokok pegawai tetap, perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut PT Cepat Saji, daftar jumlah gaji dan jumlah pegawai outlet, bukti potong, dan SPT masa Januari sampai Desember. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif, kemudian data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi (Winarsih, 2022).

Wahyudi (2022) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang hanya menggambarkan isi suatu variabel dalam penelitian, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena dengan data (angka) apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu.

3.2 Sifat Penelitian Terapan

Pada penelitian terapan ini bersifat deskriptif yang nantinya diharapkan dapat memberikan representasi atas objek yang diteliti. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data yang akurat dan kemudian data tersebut ditata, diproses dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas terkait masalah yang sedang diteliti dan didukung oleh data kuantitatif (Siregar, 2023). Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (Syahrizal & Jailani, 2023).

Tujuan dari metode analisis deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan hasil temuan-temuan dari analisis yang akan dilakukan oleh penulis secara detail, dengan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan PT Cepat Saji dengan menurut peraturan UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan bukti potong dan SPT masa PPh Pasal 21. Sehingga mendapatkan hasil deskripsi penelitian yang lebih rinci untuk memastikan kejelasan dan pemahaman yang optimal, serta untuk memvalidasi kebenaran dan akurasi dari hasil penelitian.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah studi kasus pada perusahaan PT Cepat Saji sebuah perusahaan bergerak dibidang *fast food* dengan produk unggulan *fried chicken*, burger, *steak*, dan *chinese food*. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan yang cukup besar, terdiri dari pegawai tetap manajemen serta pegawai outlet, dengan total sekitar 1.900 pegawai. Dalam struktur penghasilan, terdapat perbedaan antara pegawai manajemen dan pegawai outlet, di mana pegawai manajemen menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan pegawai outlet. Hal ini berdampak pada potensi pemotongan pajak penghasilan (PPh) setiap bulannya. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Cepat Saji untuk tahun 2023. Cakupan penelitian meliputi perhitungan PPh Pasal 21, penerbitan bukti potong PPh 21, serta pelaporan SPT PPh 21 Masa dari Januari hingga Desember. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengelolaan pajak penghasilan karyawan di perusahaan tersebut.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari PT Cepat Saji, sebuah perusahaan klien yang menggunakan jasa konsultasi di KJA PT ASP. Data ini dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik. Jenis data yang digunakan mencakup perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2023, bukti potong pajak, serta SPT Masa PPh 21 dari Januari hingga Desember 2023. Data tersebut akan dianalisis secara mendalam dan digunakan sebagai dasar

dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Cepat Saji.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi yang mencakup data gaji pegawai PT Cepat Saji, Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2023, bukti potong, serta SPT Masa Januari sampai Desember. Data ini diperoleh dari Kantor Jasa Akuntan PT Akuntan Sinergi Profesional yang berperan dalam membantu review pengelolaan pajak di PT Cepat Saji. Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi yang relevan melalui berbagai sumber, seperti buku, arsip, dokumen, tulisan berupa data angka dan gambar, serta laporan yang mendukung jalannya penelitian. Penulis menerapkan metode dokumentasi dalam proses pengumpulan dan analisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, guna memperoleh data yang tepat dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data numerik secara sistematis berdasarkan fakta yang ada. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Evaluasi Kesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 dengan UU No. 36 Tahun 2008

Pada penelitian ini teknik analisis data dengan mengevaluasi perhitungan PPh Pasal 21 yaitu untuk mengetahui kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan UU No. 36 Tahun 2008 pada tahun 2023. Terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk mengevaluasi perhitungan PPh Pasal 21 yaitu antara lain:

1. Mengumpulkan data terkait perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Cepat Saji pada tahun 2023.

2. Menganalisis metode perhitungan yang diterapkan oleh perusahaan dan membandingkannya dengan perhitungan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan turunannya.
3. Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam menerapkan tarif pajak, perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tunjangan yang diterima pegawai dan mekanisme pemotongan pajak.

3.6.2 Analisis Keselarasan Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan Perhitungan Pajak Menurut PT Cepat Saji

Pada penelitian ini teknik analisis data dengan menganalisis keselarasan bukti potong PPh Pasal 21 dengan Perhitungan pajak menurut PT Cepat Saji yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara bukti potong yang telah dibuat oleh PT Cepat Saji dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Cepat Saji yang bertujuan untuk menguji kepatuhan perusahaan. Terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk menganalisis Keselarasan Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan Perhitungan Pajak Menurut PT Cepat Saji yaitu antara lain:

1. Mengkaji bukti potong PPh Pasal 21 yang diterbitkan oleh PT Cepat Saji, termasuk informasi mengenai jumlah penghasilan bruto, pajak yang dipotong, serta identitas wajib pajak.
2. Memverifikasi apakah jumlah pajak yang tertera dalam bukti potong sesuai dengan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya.
3. Mengevaluasi apakah PT Cepat Saji telah menerbitkan bukti potong secara akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.6.3 Evaluasi Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Pada penelitian ini teknik analisis data dengan mengevaluasi ketepatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 yaitu untuk menilai ketepatan waktu pelaporan SPT PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Cepat Saji, serta memastikan bahwa pembayaran dan pelaporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Terdapat beberapa langkah

yang digunakan untuk mengevaluasi kesuaian Pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada PT Cepat Saji yaitu antara lain:

1. Pengumpulan Dokumen SPT PPh Pasal 21

Mengumpulkan seluruh dokumen SPT PPh Pasal 21 PT Cepat Saji untuk periode tahun 2023, baik berupa bukti pembayaran, pelaporan maupun arsip pendukung lainnya.

2. Pemeriksaan Tanggal Pembayaran dan Pelaporan

Menganalisis tanggal pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 untuk memastikan apakah pembayaran dan pelaporan dilakukan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

3. Penyusunan Hasil Evaluasi

Menyusun laporan hasil evaluasi yang berisi kesimpulan mengenai ketepatan waktu pelaporan SPT PPh Pasal 21 PT Cepat Saji.

Teknik analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepatuhan perpajakan PT Cepat Saji, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan pajak penghasilan Pasal 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum Perusahaan

PT Cepat Saji merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Fast Food Restaurant, dengan produk unggulan, Fried chicken, Burger, Steak dan Chinese food dengan sistem kemitraan. PT Cepat Saji berdiri pada **21 Februari 2010**, dan mulai membuka kemitraan untuk mendorong pengusaha-pengusaha baru dengan modal yang terjangkau sehingga memiliki suatu usaha bidang makanan yang dapat dikelola oleh perorangan atau berbadan hukum. PT Cepat Saji telah memperluas jaringannya dengan membuka gerai di berbagai wilayah, mulai dari kota besar hingga ke daerah tingkat kabupaten/kota di wilayah seperti DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Saat ini PT Cepat Saji telah berhasil mengoperasikan lebih dari 1300 *outlet*. Berikut merupakan visi dan misi yang dimiliki oleh PT Cepat Saji:

Visi:

1. Membangun jaringan outlet makanan yang unggul di berbagai lokasi.
2. Menyediakan pilihan makanan yang mengutamakan kesehatan, kualitas, dan nilai gizi yang halal.
3. Mengembangkan riset dan inovasi dalam industri makanan dan minuman.

Misi:

1. Menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda.
2. Membuka jalan bagi pengusaha muda Indonesia untuk meraih peluang usaha.
3. Mencapai keberhasilan bersama seluruh mitra yang berperan dalam perjalanan usaha PT Mulyarasa.
4. Menyediakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja untuk masyarakat luas.
5. Mendukung implementasi kebijakan dan program-program Pemerintah.

4.2 Data Khusus Perusahaan

Data khusus pada penelitian ini terdiri dari: (1) Data pegawai manajemen; (2) SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bulan Januari sampai bulan Desember; (3) Bukti Potong bulan Januari sampai bulan Desember.

1. Data pegawai manajemen

Data pegawai manajemen berupa daftar nama, status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), data penghasilan bruto bulanan, pendapatan THR (Tunjangan Hari Raya), yang akan dilampirkan pada lembar lampiran.

2. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bulan Januari sampai bulan Desember

SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) berupa formulir 1721 lampiran 1 pada bulan Januari sampai bulan Desember yang akan dilampirkan pada lembar lampiran.

3. Bukti Potong bulan Januari sampai Desember

Bukti Potong berupa lembar bukti pemotongan PPh yang dibuat pemberi kerja untuk pegawai yang berupa formulir 1721 pada bulan Januari sampai bulan Desember yang akan dilampirkan pada lembar lampiran.

4.3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini meliputi: (1) Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan UU No. 36 Tahun 2008; (2) Analisis Keselarasan Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan Perhitungan Pajak; (3) Pemeriksaan Kesuaian Pelaporan SPT PPh Pasal 21 dengan Gaji dan Jumlah Karyawan.

4.3.1 Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan UU No. 36 Tahun 2008

Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT Cepat Saji dengan perhitungan berdasarkan **UU No. 36 Tahun 2008**. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah metode yang digunakan oleh PT Cepat Saji sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengambil sampel perhitungan salah satu gaji pegawai pada bulan Januari yang menjabat sebagai direktur.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari

Perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari untuk karyawan tetap yang memiliki NPWP dan penghasilan neto nya melebihi PTKP. Pegawai dengan jabatan direktur, dengan status K/0 memiliki jabatan sebagai direktur PT Cepat Saji yang memperoleh penghasilan setahun berupa:

- gaji pokok Rp 60.000.000,
- tunjangan *incharge* Rp 50.000.000,
- uang makan Rp 15.000.000,
- tunjangan *transport* Rp 12.500.000,
- tunjangan premi BPJS Rp 2.268.000.

Sehingga Besarnya PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah:

- Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Cepat Saji

Tabel 4.1 Perhitungan PPh 21 Januari menurut PT Cepat Saji

PERHITUNGAN PPH 21 TAHUN 2023		
Menurut PT Cepat Saji		
JABATAN	DIREKTUR	
1. GAJI		
GAJI POKOK	60.000.000	
TUNJANGAN INCHARGE	50.000.000	
UANG MAKAN	15.000.000	
TUNJANGAN TRANSPORT	12.500.000	
GAJI BRUTO SEBULAN	137.500.000	
GAJI BRUTO SETAHUN	1.650.000.000	
2. PENGURANGAN		
BIAYA JABATAN	6.000.000	
ASURANSI	12.600.000	
TUNJANGAN HARI TUA	12.600.000	
TUNJANGAN KESEHATAN	492.000	
	31.692.000	
GAJI NETTO	1.618.308.000	
PENGURANGAN		
PTKP K0	58.500.000	
	1.559.808.000	
PERHITUNGAN		
5%X60JT	3.000.000	60.000.000
15%X190JT	28.500.000	190.000.000
25%X500JT	125.000.000	500.000.000
30%X809.808.000	242.942.400	750.000.000
	399.442.400	809.808.000
PEMBAYARAN PPH SETAHUN	399.442.400	
PEMBAYARAN PAJAK	33.286.867	

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

- Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016

Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Januari menurut pajak

PERHITUNGAN PPH 21 TAHUN 2023		
Menurut UU No 36 Tahun 2008		
JABATAN	DIREKTUR	
1. GAJI		
GAJI POKOK	60.000.000	
TUNJANGAN INCHARGE	50.000.000	
UANG MAKAN	15.000.000	
TUNJANGAN TRANSPORT	12.500.000	
GAJI BRUTO SEBULAN	137.500.000	
GAJI BRUTO SETAHUN	1.650.000.000	
2. PENGURANGAN		
BIAYA JABATAN	6.000.000	
TUNJANGAN HARI TUA (JHT)	33.000.000	
JAMINAN Pensiun (JP)	16.500.000	
	55.500.000	
2. PENAMBAH		
JAMINAN KEMATIAN (JKM)	49.500.000	
TUNJANGAN KECELAKAAN KERJA (JKK)	3.960.000	
	53.460.000	
GAJI NETTO	1.647.960.000	
PENGURANGAN		
PTKP K/0	58.500.000	
	1.589.460.000	
PERHITUNGAN		
5%X60JT	3.000.000	60.000.000
15%X190JT	28.500.000	190.000.000
25%X500JT	62.500.000	250.000.000
30%X809.808.000	326.838.000	1.089.460.000
	420.838.000	
PEMBAYARAN PPH SETAHUN	420.838.000	
PEMBAYARAN PAJAK	35.069.833	

Dari hasil perbandingan perhitungan menurut perhitungan PT Cepat Saji PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 33.286.867 sedangkan menurut perhitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016 sebesar Rp 35.069.833 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 1.782.966** yang merupakan **kurang bayar** bagi PT Cepat Saji. Hal tersebut terjadi karena PT Cepat Saji tidak memasukkan unsur JHT BPJS yang ditanggung pegawai yang bersangkutan sebesar 2% dari gaji pokok sebagai unsur pengurang penghasilan bruto melainkan sejumlah Rp 12.600.000. Kemudian PT Cepat Saji juga tidak memasukkan unsur JKK sebesar 0,24% dari gaji bruto dan JKM sebesar 0,3% dari gaji bruto yang ditanggung oleh perusahaan sebagai penambah penghasilan pegawai. Adanya ketidaksesuaian antara tunjangan yang di hitung oleh PT Cepat Saji antara lain:

- a. Asuransi sebesar Rp 12.600.000
- b. Tunjangan hari tua sebesar Rp 12.600.000
- c. Tunjangan kesehatan sebesar Rp 492.000

Sedangkan yang seharusnya dipotong dan dibayarkan ke pihak BPJS pada bulan Januari antara lain:

- a. Tunjangan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari gaji bruto setahun. Jika sebulan sebesar Rp 2.750.000 sehingga bila disetahunkan sebesar setahun Rp 33.000.000
- b. Jaminan Pensiun (JP) sebesar 1% dari gaji bruto setahun. Jika sebulan sebesar Rp 1.375.000 sehingga bila disetahunkan sebesar Rp 16.500.000
- c. Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% dari gaji bruto setahun. Jika sebulan sebesar Rp 4.125.000 sehingga bila disetahunkan sebesar Rp 49.500.000
- d. Jaminan Kesehatan (JKK) sebesar 0,24% dari gaji bruto setahun. Jika sebulan sebesar Rp 330.000 sehingga bila disetahunkan sebesar Rp 3.960.000

Dalam konteks *Compliance Theory*, temuan ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan fiskal perusahaan, baik secara administratif maupun substantif. *Compliance Theory* menekankan pentingnya ketaatan terhadap regulasi perpajakan, baik karena kesadaran sendiri (*voluntary compliance*) maupun karena adanya pengawasan dan penegakan hukum (*enforced compliance*). Ketidakpatuhan yang ditemukan dalam studi ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi, sistem pengelolaan pajak yang belum optimal, atau lemahnya kontrol internal perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik perpajakan yang belum sesuai aturan, tetapi juga memperkuat relevansi *Compliance Theory* dalam mengevaluasi dan menganalisis perilaku wajib pajak, serta menjadi dasar untuk perbaikan sistem kepatuhan di masa mendatang.

Dari hasil perhitungan PPh 21 di atas maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh PT Cepat Saji tidak sesuai dengan Peraturan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriah & Herviana (2021), yang menemukan bahwa perusahaan yang dijadikan objek penelitian tidak memasukkan unsur JHT BPJS yang ditanggung pegawai yang bersangkutan sebesar 2% dari gaji pokok sebagai unsur pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan dalam penelitian ini berada dalam garis yang sama dengan penelitian sebelumnya.

Hasil pembahasan pada perhitungan PPh Pasal 21 ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Tambunan & Gani (2024), yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia” dimana menunjukkan bahwa PT. Sagami Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan PPh pasal 21 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan lebih bayar atas pajak penghasilan pasal 21. Namun, Tarif PTKP yang digunakan PT. Sagami Indonesia Cabang Medan telah

sesuai dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016.

4.3.2 Analisis Keselarasan Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan Perhitungan Pajak

Pada analisis ini akan mengkaji bukti potong PPh Pasal 21 yang diterbitkan oleh PT Cepat Saji, termasuk informasi mengenai jumlah penghasilan bruto dan pajak yang dipotong, kemudian Memverifikasi apakah jumlah pajak yang tertera dalam bukti potong sesuai dengan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya, setelah itu akan dilakukan evaluasi apakah PT Cepat Saji telah menerbitkan bukti potong secara akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.3 Perbandingan perhitungan menurut PT Cepat Saji dengan Bukti Potong

N	Bulan	Total Perhitungan menurut PT Cepat Saji	Total pada Bukti Potong	Selisih
1	Januari	53.526.984,67	53.489.485,00	37.499,67
2	Februari	53.523.213,00	53.523.213,00	-
3	Maret	54.672.819,67	54.635.318,00	37.501,67
4	April	127.564.140,00	126.761.529,00	802.611,00
5	Mei	54.654.911,66	54.617.410,00	37.501,66
6	Juni	54.636.162,00	54.617.412,00	18.750,00
7	Juli	54.636.162,00	54.617.412,00	18.750,00
8	Agustus	54.636.162,00	54.617.412,00	18.750,00
9	September	54.636.162,00	54.617.412,00	18.750,00
10	Oktober	54.636.162,00	54.654.912,00	- 18.750,00
11	November	54.636.162,00	54.654.912,00	- 18.750,00
12	Desember	59.243.361,67	60.238.339,00	- 994.977,33

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

Berikut adalah hasil analisis lengkap terhadap perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 antara PT Cepat Saji dengan bukti potong resmi dari bulan Januari hingga Desember 2023, dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan gaji pegawai PT Cepat Saji pada bukti potong **belum sesuai**. Karena terdapat beberapa selisih pada beberapa bulannya antara lain:

1. Januari

- 1) Pada Perhitungan PT Cepat Saji: Rp53.526.984,67
- 2) Pada Bukti Potong: Rp53.489.485,00

- 3) **Terdapat Selisih:** Rp37.499,67 yaitu lebih tinggi versi perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan input PPh terutang pada salah satu pegawai atas nama Axxx Axx Sxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 2.629 sedangkan pada perhitungan PT Cepat Saji sebesar Rp 40.129. Di bawah ini merupakan tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan januari

Tabel 4. 4 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan januari

JANUARI					
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
2	Axxx Axx Sxxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	Rp 2.629,00	37.500,00
36	Oxxx Sxxxxxx	19.500.000,00	5.725.166,67	Rp 5.725.167,00	(0,33)
TOTAL		569.000.000,00	53.526.984,67	Rp 53.489.485,00	37.499,67

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

2. Februari

- 1) Pada bulan Februari menunjukkan bahwa perhitungan PT Cepat Saji telah **sesuai dengan bukti potong**, dan tidak ditemukan adanya perbedaan.

3. Maret

- 1) **Pada Perhitungan PT Cepat Saji:** Rp 54.672.819,67
- 2) **Pada Bukti Potong:** Rp 54.635.318,00
- 3) **Terdapat Selisih:** Rp 37.501,67 yaitu lebih tinggi versi perhitungan PT Cepat Saji. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan input PPh terutang pada salah satu pegawai atas nama Axxx Axx Sxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 2.629 sedangkan pada perhitungan PT Cepat Saji sebesar Rp 40.129. Di bawah ini merupakan tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Maret

Tabel 4. 5 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Maret

MARET					
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
2	Axxx Axx Sxxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	Rp 2.629,00	Rp (37.500,00)
29	Jxxxxxx	40.000.000,00	5.431.416,67	Rp 5.431.416,00	Rp (0,67)
40	Nxxxx Axxx	137.500.000,00	34.328.533,33	Rp 34.328.533,00	Rp (0,33)
42	Oxxx Sxxxxx	40.000.000,00	5.725.166,67	Rp 5.725.166,00	Rp (0,67)
TOTAL		628.550.000,00	54.672.819,67	Rp 54.635.318,00	(37.501,67)

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

4. April

- 1) Pada Perhitungan PT Cepat Saji: Rp 127.564.140,00
- 2) Pada Bukti Potong: Rp 126.761.529,00
- 3) 4) Terdapat Selisih: Rp 802.611,00 yaitu lebih tinggi versi perusahaan.

Hal tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan input PPh terutang pada pegawai atas nama Sxxxx Pxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 730.050 sedangkan pada perhitungan PT Cepat Saji sebesar Rp 1.526.250, sehingga mengalami selisih sebesar Rp 796.200 dan pada pegawai atas nama Sxxxxx Rxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 685.700 sedangkan pada perhitungan PT Cepat Saji sebesar Rp 692.500, sehingga mengalami selisih sebesar Rp 6.800. Di bawah ini merupakan tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan April.

Tabel 4. 6 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan April

APRIL					
NO	Nama Pegawai	Penghasilan Bruto Bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
2	Axxx Axx Sxxxxxx	6.500.000	350.279	350.729	(450)
28	Jxxxxxx	40.000.000	13.681.417	13.681.417	(0)
29	Kxxxxx Wxxxxxx	8.250.000	485.821	485.860	(39)
37	Mxxxxxx	6.000.000	251.250	251.150	100
39	Nxxxx Axxx	137.500.000	67.328.533	67.328.533	0
44	Sxxxx Pxxxxxx	10.750.000	1.526.250	730.050	796.200
50	Sxxxxx Rxxxxx	10.500.000	692.500	685.700	6.800
Total			127.564.140	126.761.529	802.611

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

5. Mei

- 1) Pada Perhitungan PT Cepat Saji: Rp 54.654.911,66
- 2) Pada Bukti Potong: Rp 54.617.410,00

- 3) **Terdapat Selisih:** Rp 37.501,66 yaitu lebih tinggi versi perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan input PPh terutang pada pegawai atas nama Axxx Axx Sxxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 2.629,00 sedangkan pada perhitungan PT Cepat Saji sebesar Rp 40.129,00, sehingga mengalami selisih sebesar Rp 37.500,00. Di bawah ini merupakan tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Mei.

Tabel 4. 7 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Mei

MEI						
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong	
2	Axxx Axx Sxxxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	Rp 2.629,00	37.500,00	
28	Jxxxxxx	40.000.000,00	5.431.416,67	Rp 5.431.416,00	0,67	
39	Nxxxx Axxx	137.500.000,00	34.328.533,33	Rp 34.328.533,00	0,33	
41	Oxxx Sxxxxx	40.000.000,00	5.725.166,67	Rp 5.725.166,00	0,67	
TOTAL		622.550.000,00	54.654.911,66	54.617.410,00	37.501,66	

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

6. Juni sampai September

- 1) **Pada Perhitungan PT Cepat Saji:** Rp 54.636.162,00
- 2) **Pada Bukti Potong:** Rp 54.617.412,00
- 3) **Selisih:** Konsisten sebesar Rp18.750,00 setiap bulan (lebih tinggi versi PT Cepat Saji).
- 4) Hal tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan input PPh terutang pada pegawai atas nama Axxx Axx Sxxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 2.629,00 sedangkan pada perhitungan PT Cepat Saji sebesar Rp 40.129,00, sehingga mengalami selisih sebesar Rp 37.500,00 lebih tinggi versi PT Cepat Saji. Kemudian pada pegawai atas nama Zxxxxx Uxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 43.533, sedangkan pada perhitungan PPh menurut PT Cepat Saji sebesar Rp 24.783 sehingga selisih Rp 18.750,00 lebih besar versi bukti potong. Hal tersebut terjadi karena pada bulan juni pegawai Zxxxxx Uxxxxxx menikah pada bulan juni sehingga mengalami perubahan PTKP. Di bawah ini merupakan tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Juni sampai September.

Tabel 4. 8 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Juni

JUNI					
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
2	Axxx Axx Sxxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	Rp 2.629,00	37.500,00
53	Zxxxxx Uxxxxxx	5.750.000,00	24.783,00	Rp 43.533,00	(18.750,00)
TOTAL		622.550.000,00	54.636.162,00	54.617.412,00	18.750,00

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

Tabel 4. 9 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Juli

JULI					
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
2	Axxx Axx Sxxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	Rp 2.629,00	37.500,00
53	Zxxxxx Uxxxxxx	5.750.000,00	24.783,00	Rp 43.533,00	(18.750,00)
TOTAL		622.550.000,00	54.636.162,00	54.617.412,00	18.750,00

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

Tabel 4. 10 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Agustus

AGUSTUS					
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
2	Axxx Axx Sxxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	Rp 2.629,00	37.500,00
53	Zxxxxx Uxxxxxx	5.750.000,00	24.783,00	Rp 43.533,00	(18.750,00)
TOTAL		622.550.000,00	54.636.162,00	54.617.412,00	18.750,00

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

Tabel 4. 11 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan September

SEPTEMBER					
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
2	Axxx Axx Sxxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	Rp 2.629,00	37.500,00
TOTAL		622.550.000,00	54.636.162,00	54.617.412,00	18.750,00

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

7. Oktober dan November

- 1) Pada Perhitungan PT Cepat Saji: Rp 54.636.162,00
- 2) Pada Bukti Potong: Rp 54.654.912,00
- 3) Selisih: -Rp18.750,00 (lebih tinggi versi bukti potong)
- 4) Selisih tersebut disebabkan karena pegawai atas nama Zxxxxx Uxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 43.533, sedangkan pada perhitungan PPh menurut PT Cepat Saji sebesar Rp 24.783 sehingga

selisih Rp 18.750,00 lebih besar versi bukti potong. Hal tersebut terjadi karena pada bulan juni pegawai Zxxxxx Uxxxxxx menikah pada bulan juni sehingga mengalami perubahan PTKP. Di bawah ini merupakan tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Oktober sampai November.

Tabel 4. 12 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Oktober

OKTOBER					
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
52	Zxxxxx Uxxxxxx	5.750.000,00	24.783,00	Rp 43.533,00	(18.750,00)
TOTAL		616.700.000,00	54.636.162,00	54.654.912,00	(18.750,00)

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

Tabel 4. 13 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan November

NOVEMBER					
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
52	Zxxxxx Uxxxxxx	5.750.000,00	24.783,00	Rp 43.533,00	(18.750,00)
TOTAL		616.700.000,00	54.636.162,00	54.654.912,00	(18.750,00)

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

8. Desember

- 1) **Pada Perhitungan PT Cepat Saji:** Rp 59.243.361,67
- 2) **Pada Bukti Potong:** Rp 60.238.339,00
- 3) **Selisih:** Rp 994.977,33 (lebih tinggi versi bukti potong)
- 4) Selisih tersebut disebabkan pada beberapa pegawai sebagai berikut:
 - Atas nama Axxx Axx Sxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 314.531,00, sedangkan pada perhitungan PPh menurut PT Cepat Saji sebesar Rp 354.660,00 sehingga selisih Rp 40.129,00 lebih besar versi PT Cepat Saji. Hal tersebut terjadi karena terjadi salah input PPh Terutang.
 - Atas nama Dxxxxxx Pxxxxxxx Sxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 39.570,00, sedangkan pada perhitungan PPh menurut PT Cepat Saji sebesar Rp 59.350,00 sehingga selisih Rp 19.780,00 lebih besar versi PT Cepat Saji. Hal tersebut terjadi karena terjadi salah input PPh Terutang.

- Atas nama M. Sxxxxx Mxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 80.728,00, sedangkan pada perhitungan PPh menurut PT Cepat Saji sebesar Rp 53.817,00 sehingga selisih Rp 26.911,00 lebih besar versi Bukti Potong. Hal tersebut terjadi karena terjadi salah input PPh Terutang.
- Atas nama Sxxxxx Pxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 1.038.750,00, sedangkan pada perhitungan PPh menurut PT Cepat Saji sebesar Rp 242.550,00 sehingga selisih Rp 796.200,00 lebih besar versi Bukti Potong. Hal tersebut terjadi karena terjadi salah input PPh Terutang.
- Atas nama Sxxxxx Rxxxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 265.131,00, sedangkan pada perhitungan PPh menurut PT Cepat Saji sebesar Rp 40.129,00 sehingga selisih Rp 225.002,00 lebih besar versi Bukti Potong. Hal tersebut terjadi karena terjadi salah input PPh Terutang.
- Atas nama Sxxxxx Rxxxxx, pada bukti potong sebesar Rp 217.500,00, sedangkan pada perhitungan PPh menurut PT Cepat Saji sebesar Rp 210.700,00 sehingga selisih Rp 6.800,00 lebih besar versi Bukti Potong. Hal tersebut terjadi karena terjadi salah input PPh Terutang.

Di bawah ini merupakan tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Desember.

Tabel 4. 14 Tabel perbandingan perhitungan PPh 21 PT Cepat Saji dengan bukti potong bulan Desember

DESEMBER					
No	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Perhitungan PPh oleh PT Cepat Saji	Bukti Potong	Selisih dengan Bukti Potong
1	Axxxx Yxxxx Rxxxxx	6.000.000,00	16.379,00	16.381,00	(2,00)
2	Axxx Axx Sxxxxx	6.500.000,00	354.660,00	314.531,00	40.129,00
3	Axxx Rxxxxx	7.250.000,00	74.717,00	74.713,00	4,00
6	Axxxx Rxxxxx	6.750.000,00	32.967,00	32.963,00	4,00
7	Axxxx Hxxxx Axxxx	5.750.000,00	6.033,00	6.037,00	(4,00)
12	Dxxx Axx Cxxxxx	7.250.000,00	56.342,00	56.338,00	4,00
13	Dxxx Wxxxxxxx	8.250.000,00	160.233,00	160.237,00	(4,00)
15	Dxxxxx Mxx W	5.600.000,00	35.342,00	35.338,00	4,00
16	Dxxxxx Pxxxxxx Sxxxx	5.250.000,00	59.350,00	39.570,00	19.780,00
17	Exxxx Uxxxx	6.350.000,00	34.533,00	34.537,00	(4,00)
18	Exx Axxxxxxx	5.750.000,00	23.254,00	23.256,00	(2,00)
19	Exx Sxxxxxxx	5.400.000,00	13.258,00	13.260,00	(2,00)
20	Exxx Sxxxxx Axxxx	6.250.000,00	24.246,00	24.247,00	(1,00)
21	Fxxx Bxxxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	40.131,00	(2,00)
24	Hxxxxxxx	6.250.000,00	29.783,00	29.787,00	(4,00)
29	Kxxxxx Wxxxxx	8.250.000,00	141.485,00	141.440,00	45,00
30	M. Sxxxx Mxxxxx	5.400.000,00	53.817,00	80.728,00	(26.911,00)
32	Mxxxxxx Fxxxx	7.000.000,00	26.092,00	26.088,00	4,00
34	Mxxxxxx Fxxx	6.250.000,00	28.254,00	28.256,00	(2,00)
35	Mxxxxxx Hxxxx	6.000.000,00	16.379,00	16.381,00	(2,00)
37	Mxxxxxx Sxxxxxxx	7.000.000,00	44.842,00	44.838,00	4,00
41	Nxxxx Axxx	137.500.000,00	36.411.866,67	36.411.869,00	(2,33)
42	Oxxx Ixxx Kxxxxxxx	5.750.000,00	32.158,00	32.162,00	(4,00)
44	Pxxxxxx	7.850.000,00	103.442,00	103.438,00	4,00
45	Rxxx Exx Sxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	40.131,00	(2,00)
47	Sxxxx Pxxxxx	10.750.000,00	242.550,00	1.038.750,00	(796.200,00)
50	Sxxx Rxx Mxxxxx	6.000.000,00	55.408,00	55.412,00	(4,00)
51	Sxxxx Rxxxxx	6.500.000,00	40.129,00	265.131,00	(225.002,00)
52	Sxxxxx	6.250.000,00	9.504,00	9.506,00	(2,00)
53	Sxxxx Rxxxx	10.500.000,00	210.700,00	217.500,00	(6.800,00)
55	Sxxxxx	5.750.000,00	130.600,00	130.603,00	(3,00)
TOTAL		642.450.000,00	59.243.361,67	60.238.339,00	(994.977,33)

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

Dari hasil evaluasi antara perhitungan PPh 21 dengan bukti potong bulan Januari sampai Desember tahun 2023 terdapat temuan ketidaksesuaian antara hasil perhitungan PT Cepat Saji dengan bukti potong. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya potensi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik dari sisi akurasi perhitungan maupun kelengkapan pelaporan.

Dalam kerangka *Compliance Theory*, temuan ini mengindikasikan bahwa PT Cepat Saji belum sepenuhnya memenuhi standar kepatuhan pajak sebagaimana diatur dalam regulasi. *Compliance Theory* menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak secara sukarela dan tepat waktu memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *non-compliance*, baik yang bersifat *unintentional* karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan teknis perhitungan, maupun karena lemahnya pengawasan internal terhadap pelaporan pajak. Oleh karena itu,

penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi dan membenahan terhadap sistem administrasi perpajakannya guna memastikan bahwa pelaporan yang dilakukan telah sesuai dan akurat. Temuan ini juga memperkuat pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Compliance Theory* sebagai dasar dalam menilai dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta sebagai landasan untuk menghindari risiko sanksi administrasi maupun pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Hasil pembahasan evaluasi keselarasan perhitungan PPh Pasal 21 dengan bukti potong ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan & Gani (2024), yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia” dimana menunjukkan bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Sagami Indonesia cabang Medan belum sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan PT. Sagami akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2022), yang berjudul “Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Vi Pt Pegadaian Makassar)” dimana menunjukkan evaluasi pemotongan jumlah PPh pasal 21 yang dipotong dari bulan Januari-Desember tidak memiliki selisih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh kantor wilayah VI PT Pegadaian Makassar terhadap pegawai tetapnya telah patuh dan sesuai dengan UU yang berlaku.

4.3.3 Evaluasi Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Pada pembahasan ini akan mengevaluasi ketepatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh 21 yaitu dengan menganalisis tanggal pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang terdapat pada bukti SPT induk formulir 1721. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh 21 yang disampaikan oleh perusahaan telah dilakukan secara tepat waktu di mana akan mencerminkan tingkat kepatuhan pengelolaan PPh Pasal 21 pada PT Cepat Saji.

Tabel 4. 15 Tanggal pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2023

No	Bulan	Masa Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan
1	Januari	Jan-23	10/02/2023	15/02/2023
2	Februari	Feb-23	08/03/2023	10/03/2023
3	Maret	Mar-23	10/04/2023	13/04/2023
4	April	Apr-23	08/05/2023	14/05/2023
5	Mei	Mei-23	09/06/2023	12/06/2023
6	Juni	Jun-23	10/07/2023	13/07/2023
7	Juli	Jul-23	09/08/2023	18/08/2023
8	Agustus	Agu-23	11/09/2023	16/09/2023
9	September	Sep-23	10/10/2023	16/09/2023
10	Oktober	Okt-23	08/11/2023	12/11/2023
11	November	Nov-23	08/12/2023	13/12/2023
12	Desember	Des-23	09/01/2024	14/01/2024

Sumber: Data dari KJA PT Akuntan Sinergi Profesional

Pada tabel di atas ini menunjukkan ringkasan tanggal pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa PT Cepat Saji telah patuh dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan PPh Pasal 21. Seluruh kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan tepat waktu, sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk batas pembayaran pajak dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk batas pelaporan pajak. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No. 101/PMK.010/2016. Dengan demikian, dari aspek ketepatan waktu, PT Cepat Saji dapat dinilai telah melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya secara baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan PPh Pasal 21 pada PT Cepat Saji khususnya pada pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21, perusahaan telah melaporkan dengan tepat waktu artinya perusahaan sudah patuh dalam melakukan

kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya. Yang artinya hasil pembahasan ini sejalan dengan *compliance teory* (teori kepatuhan) dimana perusahaan telah patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No. 101/PMK.010/2016

Hasil pembahasan pada evaluasi pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2022), dengan judul “Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Vi Pt Pegadaian Makassar)” yang menyebutkan bahwa Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan di Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar sudah sesuai dengan aturan yang ada karena tidak melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang yang ada. Dengan demikian untuk pelaporan STP Masa dan SPT Tahunan karyawan tetap karyawan tetap Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak No PER- 16/PJ/2016. Namun penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maghfirah (2021), yang menyatakan bahwa dalam hal pelaporan PPh Pasl 21, PT Bantimurung indah mengalami telat lapor karena terlambat melakukan penyetoran sehingga berpengaruh pada pelaporan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan terhadap pengelolaan PPh Pasal 21 pada PT Cepat Saji, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Cepat Saji belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kekeliruan dalam memperhitungkan beberapa komponen penghasilan, khususnya pada elemen tunjangan. Akibatnya terjadi selisih dalam jumlah pajak terutang yang menimbulkan kondisi kurang bayar maupun lebih bayar.
2. Pelaporan PPh Pasal 21 pada bukti potong PPh Pasal 21 Terdapat ketidaksesuaian antara bukti potong yang diterbitkan oleh PT Cepat Saji dan hasil perhitungan PPh Pasal 21. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kesalahan dalam input data pegawai serta tidak diperbaruinya status perpajakan individu. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan data karyawan dan administrasi perpajakan perusahaan.
3. Pembayaran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 21 oleh PT Cepat Saji telah dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan yang baik terhadap kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam aspek perhitungan dan kesesuaian data yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan akurasi dan kualitas pelaporan pajak di masa mendatang.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis memiliki beberapa implikasi yang harus diperhatikan, sebagaimana berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui penerapan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas

pegawai, dengan harapan dapat digunakan sebagai sumber pedoman dan referensi untuk pengkajian berikutnya dalam bidang akuntansi, terutama yang berhubungan dengan penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai.

2. Bagi PT Cepat Saji

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada PT Cepat Saji untuk melakukan Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal terhadap pengelolaan pajaknya. Selain itu, diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melakukan penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa kekurangan, sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup periode pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Cepat Saji untuk tahun 2023. Keterbatasan ini membuat hasil evaluasi tidak mencerminkan tren jangka panjang atau perubahan yang mungkin terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau setelahnya.
2. Penelitian ini tidak mencantumkan bukti pembayaran pajak dari PT Cepat Saji secara langsung dan data yang digunakan seperti SPT, bukti potong, dan data penghasilan pegawai sepenuhnya berasal dari internal PT Cepat Saji. Validitas data tersebut tidak dapat diverifikasi dengan data pihak ketiga seperti Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga audit eksternal, sehingga terdapat kemungkinan bias atau manipulasi data yang tidak terdeteksi.
3. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek administratif dan kepatuhan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Aspek lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti faktor eksternal misalnya, kebijakan perpajakan yang berubah atau pengaruh ekonomi tidak dianalisis secara mendalam, sehingga dapat membatasi pemahaman tentang keseluruhan konteks kepatuhan pajak di perusahaan.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mencakup analisis jangka panjang terhadap pengelolaan PPh Pasal 21 di berbagai perusahaan, guna memahami tren serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, pengembangan modul pendidikan atau pelatihan yang berfokus pada perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa maupun praktisi terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi di bidang perpajakan juga perlu didorong sebagai upaya untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menciptakan solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Bagi PT Cepat Saji

Peningkatan ketelitian dalam perhitungan PPh Pasal 21 perlu dilakukan dengan menyesuaikan sepenuhnya pada ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan dan potensi kurang bayar maupun lebih bayar. Implementasi sistem informasi akuntansi pajak yang terintegasi juga sangat penting untuk meminimalisir kesalahan input data serta memastikan akurasi dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak. Selain itu, pelatihan rutin bagi sumber daya manusia yang menangani perpajakan perlu diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Anissa, D. N., Ningsih, S., & Hasan, M. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023

Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/832>

Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065–2076. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>

Fitriah, & Herviana, D. (2021). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK RI No.101/PMK.010/2016 Pada Karyawan CV Nusantara Tehnik Di Kabupaten Berau. *Accountia Journal*, 5(1), 33–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.35915/accountia.v5i01.560>

Haryanto, A. C., Elim, I., Pusung, R. J., Perhitungan, A., Pemotongan, D. A. N., Penghasilan, P., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32005>

Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/.v4i2.244>

Lesmana, F., Putra, H., Angi, I. S., Rafael, M., & Aulia, S. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jratirtayasa.v7i1.13349>

Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis Pemotongan , Penyetoran Dan Pelaporan. *Jurnal Pabean*, 3(1), 65–78.

Masdar, N. A. (2023). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pegawai Tetap Pada Perumda Air Minum Kota Makassar. *BUGIS: Journal of Business, Technology, & Social Science*, 1(3), 1–9.

Muh Jasmin, Risnawati, Rahma Sari Siregar, D. (2023). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. CV.Eureka Media Aksara.

Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 328–337.

- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Tambunan, Y. R. L., & Gani, A. (2024). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia. *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research*, 4(2), 5230–5240. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9651>
- Wahyudi, W. (2022). Analisis Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Blended Learning Saat Pandemi Covid-19 (Deskriptif Kuantitatif Di Sman 1 Babadan Ponorogo). *KadikmA*, 13(1), 68. <https://doi.org/10.19184/kdma.v13i1.31327>
- Wibawa, K., Dwi, O., Khudori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPh Pasal 21 (Berdasarkan PP NO.58 TAHUN 2023). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, Vol. 4(No. 4), 357–368. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jeps.v4i4.1838> ISSN
- Widyawati, K., & Suidiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 237–248. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2919>
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian Makassar). *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.406>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Gaji Pegawai dan Status Pegawai

No	Nama Pegawai	Penghasilan Bruto bulanan	THR	Status
1	Axxxx Yxxxx Rxxxxxx	6.000.000,00	5.500.000,00	K/1
2	Axxx Axx Sxxxxxx	6.500.000,00	6.000.000,00	K/0
3	Axxx Rxxxx	7.250.000,00	6.750.000,00	K/1
4	Axxx Sxxxxxx	7.200.000,00	6.700.000,00	K/2
5	Axxx Axx Sxxxxxx	7.000.000,00	6.500.000,00	K/1
6	Axxxx Rxxxxxx	6.750.000,00	6.250.000,00	K/2
7	Axxxx Hxxxx Axxxx	5.750.000,00	5.250.000,00	K/1
8	Axxxx Axxxx	6.750.000,00	6.250.000,00	K/2
9	Bxxxxxx Sxxxxxx	5.750.000,00	5.250.000,00	k/0
10	Bxxx Lxxxxxx	16.000.000,00	13.500.000,00	K/3
11	Cxxxx Wxxxxxx	13.500.000,00	12.000.000,00	TK/0
12	Dxxx Axx Cxxxxxx	7.250.000,00	6.750.000,00	K/2
13	Dxxxx	7.250.000,00	6.750.000,00	K/0
14	Dxxxxxx Mxx W	5.600.000,00	4.850.000,00	TK/0
15	Dxxxxxx Pxxxxxx Sxxxx	5.250.000,00	4.750.000,00	TK/0
16	Exxxx Uxxxx	6.350.000,00	5.850.000,00	K/1
17	Exx Axxxxxx	5.750.000,00	5.250.000,00	K/0
18	Exx Sxxxxxx	5.400.000,00	4.900.000,00	K/0
19	Exxx Sxxxxxx Axxxx	6.250.000,00	5.750.000,00	K/2
20	Fxxx Bxxxx Wxxxx	6.000.000,00	-	K/1
21	Fxxx Bxxxxxx	6.500.000,00	6.000.000,00	K/1
22	Gxxxx Axx Wxxxx	11.750.000,00	10.250.000,00	K/2
23	Gxxxx Exx Pxxxx	7.000.000,00	6.500.000,00	K/2
24	Hxxxxxx	6.250.000,00	5.750.000,00	K/1
25	Hxxxxxx Pxxxxxx	7.250.000,00	6.750.000,00	K/2
26	Ixxx Axxxx Dxxxx	10.500.000,00	9.500.000,00	K/3
27	Ixxx Bxxxxxx	19.500.000,00	16.500.000,00	K/1
28	Jxxxxxx	40.000.000,00	33.000.000,00	K/3
29	Kxxxx Wxxxxxx	8.250.000,00	7.250.000,00	K/0
30	Lxxxx Bxxxx Mxxxxxx	5.850.000,00	5.350.000,00	K/2
31	M. Sxxxx Mxxxxxx	5.400.000,00	4.900.000,00	TK/0
32	Mxxxxxx Sxxxx	5.750.000,00	-	K/2
33	Mxxxxxx Fxxxx	7.000.000,00	6.500.000,00	K/3
34	Mxxxxxx Axxx	17.000.000,00	14.000.000,00	K/2
35	Mxxxxxx Fxxx	6.250.000,00	5.750.000,00	K/1
36	Mxxxxxx Hxxxx	6.000.000,00	5.500.000,00	K/1
37	Mxxxxxx Rxxxx Mxxxxxx	4.750.000,00	-	TK/0
38	Mxxxxxx Sxxxxxx	7.000.000,00	6.500.000,00	K/2
39	Mxxxxxx	6.000.000,00	5.500.000,00	K/2
40	Nxxx Axxxx	7.000.000,00	6.000.000,00	TK/0
41	Nxxxxxx	5.750.000,00	-	TK/0
42	Nxxxx Axxx	137.500.000,00	110.000.000,00	K/0
43	Oxx Ixxx Kxxxxxx	5.750.000,00	5.350.000,00	K/1
44	Oxxx Sxxxx	40.000.000,00	16.000.000,00	K/3
45	Pxxxxxx	7.850.000,00	7.350.000,00	K/1
46	Rxxx Exx Sxxxxxx	6.500.000,00	6.000.000,00	K/1
47	Rxxxxxx	4.750.000,00	-	TK/0
48	Sxxxx Pxxxxxx	10.750.000,00	9.750.000,00	K/1
49	Sxxxx Mxxx	5.800.000,00	5.300.000,00	K/2
50	Sxxxx Mxxxxxx	13.000.000,00	10.750.000,00	K/0
51	Sxxxx Wxxxxxx	4.750.000,00	-	TK/0
52	Sxxx Rxx Mxxxxxx	6.000.000,00	5.500.000,00	TK/0
53	Sxxxx Rxxxxxx	6.500.000,00	6.000.000,00	K/1
54	Sxxxxxx	6.250.000,00	5.750.000,00	K/2
55	Sxxxx Rxxxx	10.500.000,00	9.500.000,00	K/2
56	Sxxx Rxxxxxx	18.250.000,00	15.250.000,00	K/2
57	Sxxxxxx	5.750.000,00	5.250.000,00	K/0
58	Txxxx Sxxxx K.	12.250.000,00	10.750.000,00	TK/0
59	Uxxxx Mxxxxxx	5.750.000,00	5.250.000,00	K/2
60	Zxxxx Uxxxxxx	5.750.000,00	5.250.000,00	TK/0

Lampiran 2: Bukti Potong Bulan Januari

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 01 - 2023

BUKTI MASA PAJAK
 BUKTI TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

Lembar No-1 : Lembar KPP
Lembar No-2 : Lembar Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KINA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBLEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PENGHASILAN	KODE NEGERA (DOWNE)
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		B			21-10-01	10.500.000	191.650		
2		M			21-10-01	7.000.000	44.342		
3		D			21-10-01	5.600.000	35.342		
4		H			21-10-01	7.250.000	56.717		
5		H			21-10-01	6.250.000	29.783		
6		M			21-10-01	6.250.000	29.254		
7		A			21-10-01	6.750.000	32.967		
8		A			21-10-01	7.200.000	74.250		
9		E			21-10-01	6.250.000	34.533		
10		G			21-10-01	7.000.000	46.375		
11		S			21-10-01	6.000.000	55.408		
12		D			21-10-01	8.250.000	160.233		
13		K			21-10-01	8.250.000	141.485		
14		A			21-10-01	7.250.000	74.717		
15		S			21-10-01	6.250.000	9.504		
16		C			21-10-01	5.750.000	6.033		
17		M			21-10-01	6.000.000	16.379		
18		Z			21-10-01	5.750.000	43.533		
19		E			21-10-01	5.750.000	23.254		
20		F			21-10-01	6.500.000	40.129		
JUMLAH A						583.500.000	53.489.485		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						3.806.276.691			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						4.389.776.691	53.489.485		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 01 - 2023

BUKTI MASA PAJAK
 BUKTI TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

Lembar No-1 : Lembar KPP
Lembar No-2 : Lembar Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KINA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBLEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PENGHASILAN	KODE NEGERA (DOWNE)
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21		S			21-10-01	6.500.000	40.129		
22		N			21-10-01	137.500.000	33.286.967		
23		L			21-10-01	40.000.000	5.431.417		
24		B			21-10-01	19.500.000	1.522.600		
25		C			21-10-01	40.000.000	5.725.167		
26		N			21-10-01	17.000.000	1.087.450		
27		S			21-10-01	18.250.000	1.116.100		
28		C			21-10-01	13.500.000	746.350		
29		S			21-10-01	10.500.000	210.700		
30		C			21-10-01	11.750.000	318.700		
31		S			21-10-01	10.750.000	242.550		
32		T			21-10-01	12.250.000	510.850		
33		B			21-10-01	16.000.000	891.650		
34		S			21-10-01	13.000.000	619.800		
35		A			21-10-01	7.000.000	100.717		
36		A			21-10-01	6.750.000	34.550		
37		F			21-10-01	7.850.000	103.442		
38		A			21-10-01	6.500.000	2.829		
39		E			21-10-01	6.250.000	47.004		
40		A			21-10-01	7.000.000	64.750		
JUMLAH A						583.500.000	53.489.485		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						3.806.276.691			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						4.389.776.691	53.489.485		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 01 - 2023

BUKTI MASA PAJAK
 BUKTI TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

Lembar No-1 : Lembar KPP
Lembar No-2 : Lembar Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KINA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBLEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PENGHASILAN	KODE NEGERA (DOWNE)
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41		M			21-10-01	7.000.000	26.092		
42		D			21-10-01	7.250.000	56.342		
43		A			21-10-01	6.000.000	16.379		
44		A			21-10-01	5.750.000	6.033		
45		D			21-10-01	7.250.000	95.750		
46		R			21-10-01	6.500.000	40.129		
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
JUMLAH A						583.500.000	53.489.485		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						3.806.276.691			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						4.389.776.691	53.489.485		

Lampiran 3: Bukti Potong Bulan Februari

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA										FORMULIR 1721 - I									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBEHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PENGHASILAN (%)	KODE NEGARA DOMESTI										
01																			
1		N		21-10-01		137.500.000	33.286.867												
2		J		21-10-01		40.000.000	5.431.417												
3		I		21-10-01		19.500.000	1.522.800												
4		O		21-10-01		40.000.000	5.725.167												
5		M		21-10-01		17.000.000	1.087.450												
6		S		21-10-01		18.250.000	1.116.100												
7		C		21-10-01		13.500.000	742.350												
8		S		21-10-01		10.500.000	210.700												
9		G		21-10-01		11.750.000	319.700												
10		S		21-10-01		10.750.000	242.550												
11		T		21-10-01		12.250.000	510.850												
12		BI		21-10-01		16.000.000	891.850												
13		S		21-10-01		13.000.000	616.500												
14		N		21-10-01		7.000.000	100.717												
15		A		21-10-01		6.750.000	34.500												
16		P		21-10-01		7.800.000	103.442												
17		J		21-10-01		6.500.000	2.629												
18		E		21-10-01		6.250.000	47.004												
19		A		21-10-01		7.000.000	64.750												
20		M		21-10-01		7.000.000	28.062												
JUMLAH A										1.742	ORANG	3.806.935.505	53.523.213						
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBEHI PTKP																			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)												4.412.485.505	53.523.213						

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA										FORMULIR 1721 - I									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBEHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PENGHASILAN (%)	KODE NEGARA DOMESTI										
21		D		21-10-01		7.250.000	56.342												
22		A		21-10-01		6.000.000	16.378												
23		A		21-10-01		5.750.000	6.033												
24		D		21-10-01		7.250.000	95.750												
25		R		21-10-01		6.500.000	40.129												
26		B		21-10-01		10.500.000	191.850												
27		N		21-10-01		7.000.000	46.942												
28		D		21-10-01		5.600.000	35.342												
29		H		21-10-01		7.250.000	56.717												
30		H		21-10-01		6.250.000	29.783												
31		N		21-10-01		6.250.000	28.254												
32		A		21-10-01		6.750.000	32.967												
33		A		21-10-01		7.200.000	55.500												
34		E		21-10-01		6.500.000	34.533												
35		G		21-10-01		7.000.000	46.375												
36		S		21-10-01		6.000.000	55.408												
37		D		21-10-01		8.250.000	160.233												
38		K		21-10-01		8.250.000	141.485												
39		A		21-10-01		7.250.000	74.717												
40		S		21-10-01		6.250.000	9.504												
JUMLAH A										1.742	ORANG	3.806.935.505	53.523.213						
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBEHI PTKP																			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)												4.412.485.505	53.523.213						

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA										FORMULIR 1721 - I									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBEHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)										MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023		MASA PAJAK : 02 - 2023	
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PENGHASILAN (%)	KODE NEGARA DOMESTI										
41		D		21-10-01		6.750.000	8.033												
42		M		21-10-01		6.000.000	16.378												
43		Z		21-10-01		5.750.000	43.533												
44		E		21-10-01		5.750.000	23.254												
45		FI		21-10-01		6.500.000	40.129												
46		SI		21-10-01		6.500.000	40.129												
47		E		21-10-01		5.400.000	6.629												
48		FI		21-10-01		6.000.000	17.906												
49		B		21-10-01		5.400.000	8.158												
50		DI		21-10-01		5.250.000	19.783												
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			
57																			
58																			
59																			
60																			
JUMLAH A										1.742	ORANG	3.806.935.505	53.523.213						
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBEHI PTKP																			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)												4.412.485.505	53.523.213						

Lampiran 4: Bukti Potong Bulan Maret

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK									
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA									
FORMULIR 1721 - I									
MASA PAJAK: 03 - 2023									
NOMOR: 31XXXXXXXXXX									
NPP: 542.000									
Lampiran ke-1: Daftar PPH Lampiran ke-2: Daftar Pemotongan									
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)									
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMILI	
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				01	02
1		NI			21-100-01	137.500.000	34.328.533		
2		JF			21-100-01	40.000.000	5.431.416		
3		IB			21-100-01	19.500.000	1.522.600		
4		O			21-100-01	40.000.000	5.725.166		
5		M			21-100-01	17.000.000	1.087.450		
6		DI			21-100-01	19.250.000	1.16.100		
7		C			21-100-01	13.500.000	746.350		
8		SI			21-100-01	10.500.000	210.700		
9		G			21-100-01	11.750.000	318.700		
10		S			21-100-01	10.750.000	242.550		
11		TI			21-100-01	12.250.000	510.850		
12		EB			21-100-01	16.000.000	891.850		
13		S			21-100-01	10.000.000	619.800		
14		NI			21-100-01	7.000.000	100.717		
15		A			21-100-01	6.750.000	34.500		
16		PI			21-100-01	7.850.000	103.442		
17		Aa			21-100-01	6.500.000	2.629		
18		EI			21-100-01	6.250.000	47.004		
19		AI			21-100-01	7.000.000	64.750		
20		M			21-100-01	7.000.000	29.952		
JUMLAH A						616.700.000	54.635.318		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.705 ORANG	3.742.929.828		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						4.359.629.828	54.635.318		

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK									
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA									
FORMULIR 1721 - I									
MASA PAJAK: 03 - 2023									
NOMOR: 31XXXXXXXXXX									
NPP: 542.000									
Lampiran ke-1: Daftar PPH Lampiran ke-2: Daftar Pemotongan									
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)									
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMILI	
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				01	02
21		Du			21-100-01	7.250.000	56.342		
22		Aa			21-100-01	6.000.000	16.379		
23		Aa			21-100-01	5.750.000	6.033		
24		DI			21-100-01	7.250.000	95.750		
25		SI			21-100-01	6.500.000	40.129		
26		BI			21-100-01	10.500.000	191.650		
27		M	IN		21-100-01	7.000.000	44.842		
28		DI			21-100-01	5.800.000	35.342		
29		HI			21-100-01	7.250.000	56.717		
30		HI			21-100-01	6.250.000	29.783		
31		M			21-100-01	6.250.000	29.254		
32		AI			21-100-01	6.750.000	31.967		
33		AI			21-100-01	7.200.000	55.500		
34		EI			21-100-01	6.350.000	34.533		
35		GI			21-100-01	7.000.000	46.375		
36		SI			21-100-01	6.000.000	55.408		
37		DI			21-100-01	6.250.000	160.233		
38		HI			21-100-01	6.250.000	141.465		
39		AI			21-100-01	7.250.000	74.717		
40		SK			21-100-01	6.250.000	9.504		
JUMLAH A						616.700.000	54.635.318		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.705 ORANG	3.742.929.828		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						4.359.629.828	54.635.318		

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK									
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA									
FORMULIR 1721 - I									
MASA PAJAK: 03 - 2023									
NOMOR: 31XXXXXXXXXX									
NPP: 542.000									
Lampiran ke-1: Daftar PPH Lampiran ke-2: Daftar Pemotongan									
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)									
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMILI	
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				01	02
41		DI			21-100-01	5.750.000	6.033		
42		M			21-100-01	6.000.000	16.379		
43		ZF			21-100-01	5.750.000	43.533		
44		EP			21-100-01	5.750.000	21.254		
45		FE			21-100-01	6.500.000	40.129		
46		SI			21-100-01	6.500.000	40.129		
47		EP			21-100-01	5.400.000	6.629		
48		FE			21-100-01	6.000.000	17.908		
49		BP			21-100-01	5.400.000	8.158		
50		DI			21-100-01	5.250.000	19.783		
51		M	JSL		21-100-01	5.400.000	29.908		
52		SI	JLA		21-100-01	5.750.000	43.533		
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
JUMLAH A						616.700.000	54.635.318		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.705 ORANG	3.742.929.828		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						4.359.629.828	54.635.318		

Lampiran 5: Bukti Potong Bulan April

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 04 - 2023

BUKTI MASA PAJAK
 BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASSA PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMRESI
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)					
1		N			21-100-01	247.500.000	87.326.533		
2		J			21-100-01	73.000.000	13.681.417		
3		B			21-100-01	36.000.000	3.997.600		
4		O			21-100-01	56.000.000	10.058.500		
5		M			21-100-01	31.000.000	3.187.450		
6		S			21-100-01	33.500.000	3.403.000		
7		C			21-100-01	25.500.000	1.053.050		
8		D			21-100-01	20.000.000	685.700		
9		G			21-100-01	22.000.000	1.856.200		
10		S			21-100-01	20.500.000	730.050		
11		T			21-100-01	23.000.000	2.123.350		
12		B			21-100-01	29.500.000	2.916.850		
13		S			21-100-01	23.760.000	2.232.100		
14		N			21-100-01	13.000.000	385.717		
15		A			21-100-01	13.000.000	331.350		
16		P			21-100-01	15.200.000	452.592		
17		A			21-100-01	12.500.000	350.729		
18		E			21-100-01	12.000.000	342.863		
19		A			21-100-01	13.500.000	373.500		
20		M			21-100-01	13.500.000	334.842		
JUMLAH A						1.167.000.000	126.761.529		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBEHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)						2.029 ORANG	6.452.515.196		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						7.619.515.196	126.761.529		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 04 - 2023

BUKTI MASA PAJAK
 BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASSA PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMRESI
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)					
21		D			21-100-01	14.000.000	376.992		
22		A			21-100-01	11.500.000	277.629		
23		A			21-100-01	11.000.000	255.383		
24		D			21-100-01	14.000.000	416.350		
25		R			21-100-01	12.500.000	325.129		
26		B			21-100-01	20.000.000	666.650		
27		M			21-100-01	13.500.000	353.592		
28		D			21-100-01	10.450.000	265.742		
29		H			21-100-01	14.000.000	377.367		
30		H			21-100-01	12.000.000	302.883		
31		M			21-100-01	12.000.000	301.354		
32		A			21-100-01	13.000.000	329.867		
33		A			21-100-01	13.000.000	373.750		
34		E			21-100-01	12.200.000	312.383		
35		G			21-100-01	13.500.000	355.125		
36		S			21-100-01	11.500.000	316.658		
37		D			21-100-01	15.500.000	504.583		
38		K			21-100-01	15.500.000	485.860		
39		A			21-100-01	14.000.000	395.367		
40		S			21-100-01	12.000.000	282.604		
JUMLAH A						1.167.000.000	126.761.529		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBEHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)						2.029 ORANG	6.452.515.196		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						7.619.515.196	126.761.529		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 04 - 2023

BUKTI MASA PAJAK
 BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASSA PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMRESI
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)					
41		C			21-100-01	11.100.000	280.158		
42		Z			21-100-01	11.000.000	282.883		
43		E			21-100-01	11.000.000	272.604		
44		F			21-100-01	12.500.000	325.129		
45		S			21-100-01	12.500.000	325.129		
46		E			21-100-01	10.300.000	239.379		
47		B			21-100-01	11.000.000	274.133		
48		D			21-100-01	10.000.000	242.383		
49		M			21-100-01	10.300.000	259.658		
50		S			21-100-01	11.000.000	282.883		
51		M			21-100-01	11.500.000	251.150		
52		M			21-100-01	11.500.000	277.629		
53		L			21-100-01	11.000.000	78.400		
54		L			21-100-01	11.200.000	152.850		
55		S			21-100-01	11.100.000	109.300		
56									
57									
58									
59									
60									
JUMLAH A						1.167.000.000	126.761.529		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBEHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)						2.029 ORANG	6.452.515.196		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						7.619.515.196	126.761.529		

Lampiran 6: Bukti Potong Bulan Mei

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 05 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31-XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk RPP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA	KODE DOMISILI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
1		N			21-100-01	137.500.000	34.326.533			
2		J			21-100-01	40.000.000	5.431.416			
3		B			21-100-01	19.500.000	1.522.800			
4		C			21-100-01	40.000.000	5.725.166			
5		M			21-100-01	17.000.000	1.087.450			
6		S			21-100-01	16.250.000	1.116.100			
7		C			21-100-01	13.500.000	1.423.350			
8		S			21-100-01	10.500.000	210.700			
9		G			21-100-01	11.750.000	319.700			
10		S			21-100-01	10.750.000	242.550			
11		T			21-100-01	12.250.000	510.850			
12		B			21-100-01	16.000.000	891.850			
13		N			21-100-01	13.000.000	616.900			
14		N			21-100-01	7.000.000	100.717			
15		A			21-100-01	6.750.000	34.500			
16		P			21-100-01	7.850.000	103.442			
17		A			21-100-01	6.500.000	2.629			
18		E			21-100-01	6.250.000	47.004			
19		A			21-100-01	7.000.000	64.750			
20		N			21-100-01	7.000.000	26.062			
JUMLAH A							610.700.000	54.617.410		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.689 ORANG	3.716.205.924			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.326.905.924	54.617.410		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 05 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31-XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk RPP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA	KODE DOMISILI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
21		D			21-100-01	7.250.000	56.342			
22		A			21-100-01	6.000.000	16.378			
23		A			21-100-01	5.750.000	6.033			
24		D			21-100-01	7.250.000	85.750			
25		R			21-100-01	6.500.000	40.129			
26		B			21-100-01	10.500.000	191.850			
27		M			21-100-01	7.000.000	44.942			
28		D			21-100-01	5.600.000	35.342			
29		H			21-100-01	7.250.000	56.717			
30		H			21-100-01	6.250.000	29.783			
31		M			21-100-01	6.250.000	28.254			
32		A			21-100-01	6.750.000	32.967			
33		A			21-100-01	7.200.000	55.500			
34		E			21-100-01	6.500.000	34.533			
35		G			21-100-01	7.000.000	46.375			
36		S			21-100-01	6.000.000	55.408			
37		D			21-100-01	8.250.000	160.233			
38		K			21-100-01	8.250.000	141.485			
39		A			21-100-01	7.250.000	74.717			
40		S			21-100-01	6.250.000	3.504			
JUMLAH A							610.700.000	54.617.410		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.689 ORANG	3.716.205.924			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.326.905.924	54.617.410		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 05 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31-XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk RPP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA	KODE DOMISILI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
41		CI			21-100-01	5.750.000	6.033			
42		ME			21-100-01	6.000.000	16.378			
43		ZP			21-100-01	5.750.000	43.533			
44		EP			21-100-01	5.750.000	23.254			
45		FE			21-100-01	6.500.000	40.129			
46		SL			21-100-01	6.500.000	40.129			
47		EP			21-100-01	5.400.000	6.829			
48		EP			21-100-01	5.400.000	8.158			
49		DI	JSE		21-100-01	5.250.000	19.783			
50		ME	JLA		21-100-01	5.400.000	26.908			
51		SL			21-100-01	5.750.000	43.533			
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
JUMLAH A							610.700.000	54.617.410		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.689 ORANG	3.716.205.924			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.326.905.924	54.617.410		

Lampiran 7: Bukti Potong Bulan Juni

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 06 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31-XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PANGKUTAN (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
1		N			21-100-01	137.500.000	34.326.533			
2		JF			21-100-01	40.000.000	5.431.417			
3		IA			21-100-01	19.500.000	1.522.800			
4		O			21-100-01	40.000.000	5.725.167			
5		M			21-100-01	17.000.000	1.087.450			
6		S			21-100-01	18.250.000	1.116.100			
7		C			21-100-01	13.500.000	742.350			
8		SI			21-100-01	10.500.000	210.700			
9		G			21-100-01	11.750.000	319.700			
10		Su			21-100-01	10.750.000	242.550			
11		TI			21-100-01	12.250.000	510.850			
12		BI			21-100-01	16.000.000	891.850			
13		SI			21-100-01	13.000.000	619.500			
14		N			21-100-01	7.000.000	100.717			
15		A			21-100-01	8.750.000	34.500			
16		PA			21-100-01	7.850.000	103.442			
17		AI			21-100-01	6.500.000	2.629			
18		EJ			21-100-01	6.250.000	47.004			
19		AI			21-100-01	7.000.000	64.750			
20		M			21-100-01	7.000.000	28.062			
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.932 ORANG	4.148.119.736			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.758.819.736	54.617.412		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 06 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31-XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PANGKUTAN (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
21		D			21-100-01	7.250.000	56.342			
22		AI			21-100-01	6.000.000	16.378			
23		AU			21-100-01	5.750.000	6.033			
24		DI			21-100-01	7.250.000	85.750			
25		RI			21-100-01	6.500.000	40.129			
26		IV			21-100-01	10.500.000	191.850			
27		M			21-100-01	7.000.000	44.942			
28		DI			21-100-01	5.600.000	35.342			
29		HI			21-100-01	7.250.000	56.717			
30		HE			21-100-01	6.250.000	29.783			
31		M			21-100-01	6.250.000	28.254			
32		AI			21-100-01	6.750.000	32.967			
33		AI			21-100-01	7.200.000	55.500			
34		SI			21-100-01	6.500.000	34.533			
35		GI			21-100-01	7.000.000	46.375			
36		SI			21-100-01	6.000.000	55.408			
37		DI			21-100-01	8.250.000	160.233			
38		KI			21-100-01	8.250.000	141.485			
39		AI			21-100-01	7.250.000	74.717			
40		SI			21-100-01	6.250.000	3.504			
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.932 ORANG	4.148.119.736			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.758.819.736	54.617.412		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 06 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31-XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PANGKUTAN (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
41		CI			21-100-01	5.750.000	6.033			
42		MI			21-100-01	6.000.000	16.378			
43		ZV			21-100-01	5.750.000	43.533			
44		EJ			21-100-01	5.750.000	23.254			
45		FI			21-100-01	6.500.000	40.129			
46		SI			21-100-01	6.500.000	40.129			
47		EJ			21-100-01	5.400.000	6.629			
48		BI			21-100-01	5.400.000	8.158			
49		DI	JSE		21-100-01	5.250.000	19.783			
50		M	JLA		21-100-01	5.400.000	28.908			
51		SI			21-100-01	5.750.000	43.533			
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.932 ORANG	4.148.119.736			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.758.819.736	54.617.412		

Lampiran 8: Bukti Potong Bulan Juli

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA										
FORMULIR 1721 - I										
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MASA PAJAK : 07 - 2023		SATU MASA PAJAK SATU TAHUN PAJAK		NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX		542.000		Lembar ke-1 : dari 4 PDF Lembar ke-1 : dari 1 Perincian
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)			KODE NEGARA DOMIKSI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)			(I)	(II)	(III)	
1		NI			21-100-01	1.37.500.000			34.228.533	
2		JF			21-100-01	40.000.000			5.431.417	
3		IV			21-100-01	19.500.000			1.522.600	
4		CI			21-100-01	40.000.000			5.725.167	
5		MI			21-100-01	17.000.000			1.087.450	
6		SI			21-100-01	18.200.000			1.116.100	
7		CI			21-100-01	13.500.000			748.250	
8		SI			21-100-01	10.500.000			210.700	
9		CI			21-100-01	11.700.000			318.700	
10		SI			21-100-01	10.750.000			242.550	
11		TI			21-100-01	12.250.000			510.850	
12		BE			21-100-01	18.000.000			891.850	
13		SI			21-100-01	13.000.000			619.600	
14		NI			21-100-01	7.000.000			100.717	
15		AJ			21-100-01	6.750.000			34.500	
16		PL			21-100-01	7.800.000			103.642	
17		AK			21-100-01	8.500.000			2.629	
18		EF			21-100-01	6.250.000			47.004	
19		AN			21-100-01	7.000.000			64.750	
20		MA			21-100-01	7.800.000			26.862	
JUMLAH A									610.700.000	54.617.412
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/HTH SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELIBH PTKP						1.883	ORANG		4.143.473.218	
C. TOTAL (JUMLAH A + B)									4.754.173.218	54.617.412

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA										
FORMULIR 1721 - I										
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MASA PAJAK : 07 - 2023		SATU MASA PAJAK SATU TAHUN PAJAK		NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX		542.000		Lembar ke-1 : dari 4 PDF Lembar ke-1 : dari 1 Perincian
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)			KODE NEGARA DOMIKSI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)			(I)	(II)	(III)	
21		D			21-100-01	7.250.000			56.342	
22		AI			21-100-01	6.000.000			16.379	
23		AJ			21-100-01	5.750.000			6.033	
24		DI			21-100-01	7.250.000			66.750	
25		RI			21-100-01	8.500.000			40.129	
26		IV			21-100-01	10.500.000			191.650	
27		M			21-100-01	7.500.000			44.842	
28		DI			21-100-01	5.600.000			35.342	
29		HI			21-100-01	7.250.000			56.717	
30		HE			21-100-01	6.250.000			29.783	
31		M			21-100-01	6.250.000			28.254	
32		AI			21-100-01	6.750.000			32.967	
33		AI			21-100-01	7.250.000			55.500	
34		SI			21-100-01	6.250.000			34.533	
35		G			21-100-01	7.000.000			48.375	
36		SI			21-100-01	6.000.000			55.608	
37		DI			21-100-01	8.250.000			160.233	
38		KI			21-100-01	8.250.000			141.485	
39		AI			21-100-01	7.250.000			74.717	
40		SI			21-100-01	8.250.000			8.954	
JUMLAH A									610.700.000	54.617.412
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/HTH SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELIBH PTKP						1.883	ORANG		4.143.473.218	
C. TOTAL (JUMLAH A + B)									4.754.173.218	54.617.412

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA										
FORMULIR 1721 - I										
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MASA PAJAK : 07 - 2023		SATU MASA PAJAK SATU TAHUN PAJAK		NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX		542.000		Lembar ke-1 : dari 4 PDF Lembar ke-1 : dari 1 Perincian
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)			KODE NEGARA DOMIKSI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)			(I)	(II)	(III)	
41		CI			21-100-01	5.750.000			6.033	
42		MI			21-100-01	6.000.000			16.379	
43		ZI			21-100-01	5.750.000			43.533	
44		EP			21-100-01	5.750.000			23.254	
45		FE			21-100-01	8.500.000			40.129	
46		SI			21-100-01	8.500.000			40.129	
47		EP			21-100-01	5.400.000			6.629	
48		SI			21-100-01	8.400.000			8.158	
49		DI	JSA		21-100-01	5.200.000			19.783	
50		MI	JLA		21-100-01	5.400.000			26.908	
51		SI			21-100-01	5.750.000			43.533	
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
JUMLAH A									610.700.000	54.617.412
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNSI ATAU THT/HTH SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNSIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELIBH PTKP						1.883	ORANG		4.143.473.218	
C. TOTAL (JUMLAH A + B)									4.754.173.218	54.617.412

Lampiran 9: Bukti Potong Bulan Agustus

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 08 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk RPP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PANGKUTAN (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
1	N				21-100-01	137.500.000	34.326.533			
2	J				21-100-01	40.000.000	5.431.417			
3	B				21-100-01	19.500.000	1.522.800			
4	C				21-100-01	40.000.000	5.725.167			
5	N				21-100-01	17.000.000	1.087.450			
6	S				21-100-01	16.250.000	1.116.100			
7	C				21-100-01	13.500.000	1.422.350			
8	S				21-100-01	10.500.000	210.700			
9	C				21-100-01	11.750.000	319.700			
10	S				21-100-01	10.750.000	242.550			
11	T				21-100-01	12.250.000	510.850			
12	B				21-100-01	16.000.000	891.850			
13	S				21-100-01	13.000.000	619.900			
14	N				21-100-01	7.000.000	100.717			
15	A				21-100-01	6.750.000	34.500			
16	P				21-100-01	7.850.000	103.442			
17	A				21-100-01	6.500.000	2.629			
18	E				21-100-01	6.250.000	47.004			
19	A				21-100-01	7.000.000	64.750			
20	N				21-100-01	7.000.000	28.062			
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.890 ORANG	4.172.376.706			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.783.076.706	54.617.412		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 08 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk RPP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PANGKUTAN (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
21	D				21-100-01	7.250.000	56.342			
22	A				21-100-01	6.000.000	16.378			
23	A				21-100-01	5.750.000	6.033			
24	D				21-100-01	7.250.000	85.750			
25	R				21-100-01	6.500.000	40.129			
26	B				21-100-01	10.500.000	191.850			
27	M				21-100-01	7.000.000	44.942			
28	D				21-100-01	5.600.000	35.342			
29	H				21-100-01	7.250.000	56.717			
30	H				21-100-01	6.250.000	29.783			
31	M				21-100-01	6.250.000	28.254			
32	A				21-100-01	6.750.000	32.967			
33	A				21-100-01	7.200.000	55.500			
34	E				21-100-01	6.500.000	34.533			
35	G				21-100-01	7.000.000	46.375			
36	S				21-100-01	6.000.000	55.408			
37	D				21-100-01	8.250.000	160.233			
38	K				21-100-01	8.250.000	141.485			
39	A				21-100-01	7.250.000	74.717			
40	S				21-100-01	6.250.000	3.504			
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.890 ORANG	4.172.376.706			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.783.076.706	54.617.412		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 08 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk RPP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	PPH PANGKUTAN (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI	
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
41	OK				21-100-01	5.750.000	6.033			
42	ML				21-100-01	6.000.000	16.378			
43	ZA				21-100-01	5.750.000	43.533			
44	EK				21-100-01	5.750.000	23.254			
45	FE				21-100-01	6.500.000	40.129			
46	SL				21-100-01	6.500.000	40.129			
47	EK				21-100-01	5.400.000	6.629			
48	BA				21-100-01	5.400.000	6.158			
49	DH				21-100-01	5.250.000	19.783			
50	ML				21-100-01	5.400.000	26.908			
51	SU				21-100-01	5.750.000	43.533			
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIAN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.890 ORANG	4.172.376.706			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.783.076.706	54.617.412		

Lampiran 10: Bukti Potong Bulan September

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSII ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 09 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI		
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)				(i)	(ii)	
1		NA			21-100-01	137.500.000	34.326.533			
2		JA			21-100-01	40.000.000	5.431.417			
3		MI			21-100-01	19.500.000	1.522.800			
4		OT			21-100-01	40.000.000	5.725.167			
5		MR			21-100-01	17.000.000	1.087.450			
6		SL			21-100-01	16.250.000	1.116.100			
7		CJ			21-100-01	13.500.000	1.423.350			
8		SL			21-100-01	10.500.000	210.700			
9		GU			21-100-01	11.750.000	319.700			
10		SJ			21-100-01	10.750.000	242.550			
11		TF			21-100-01	12.250.000	510.850			
12		BE			21-100-01	16.000.000	891.850			
13		SJ			21-100-01	13.000.000	619.900			
14		NG			21-100-01	7.000.000	100.717			
15		AJ			21-100-01	6.750.000	34.500			
16		PI			21-100-01	7.850.000	103.442			
17		AJ			21-100-01	6.500.000	2.629			
18		EJ			21-100-01	6.250.000	47.004			
19		AJ			21-100-01	7.000.000	64.750			
20		MI			21-100-01	7.000.000	26.062			
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSII ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.850 ORANG	4.077.802.836			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.688.502.836	54.617.412		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSII ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 09 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI		
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)				(i)	(ii)	
21		D			21-100-01	7.250.000	56.342			
22		A			21-100-01	6.000.000	16.376			
23		A			21-100-01	5.750.000	6.033			
24		D			21-100-01	7.250.000	85.750			
25		R			21-100-01	6.500.000	40.129			
26		B			21-100-01	10.500.000	191.850			
27		M			21-100-01	7.000.000	44.942			
28		D			21-100-01	5.600.000	35.342			
29		H			21-100-01	7.250.000	56.717			
30		H			21-100-01	6.250.000	29.783			
31		M			21-100-01	6.250.000	28.254			
32		A			21-100-01	6.750.000	32.967			
33		A			21-100-01	7.200.000	55.500			
34		EJ			21-100-01	6.500.000	34.533			
35		G			21-100-01	7.000.000	46.375			
36		S			21-100-01	6.000.000	55.408			
37		D			21-100-01	8.250.000	160.233			
38		K			21-100-01	8.250.000	141.485			
39		A			21-100-01	7.250.000	74.717			
40		S			21-100-01	6.250.000	3.504			
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSII ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.850 ORANG	4.077.802.836			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.688.502.836	54.617.412		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSII ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 09 - 2023 BUKTI MASA PAJAK BUKTI TAHUNAN PAJAK

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX 542 000

Lampiran No. 1 - untuk PDP
Lampiran No. 2 - untuk Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI		
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)				(i)	(ii)	
41		CP			21-100-01	5.750.000	6.033			
42		MA			21-100-01	6.000.000	16.376			
43		ZA			21-100-01	5.750.000	43.533			
44		EP			21-100-01	5.750.000	23.254			
45		FE			21-100-01	6.500.000	40.129			
46		SL			21-100-01	6.500.000	40.129			
47		EP			21-100-01	5.400.000	6.629			
48		ED			21-100-01	5.400.000	6.156			
49		ED	ISE		21-100-01	5.250.000	19.783			
50		MA	ILA		21-100-01	5.400.000	26.908			
51		SL			21-100-01	5.750.000	43.533			
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
JUMLAH A							610.700.000	54.617.412		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSII ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.850 ORANG	4.077.802.836			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.688.502.836	54.617.412		

Lampiran 11: Bukti Potong Bulan Oktober

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 10 / 2023

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPH
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
1	N				21-100-01	137.500.000	34.326.533	
2	J				21-100-01	40.000.000	5.431.417	
3	B				21-100-01	19.500.000	1.522.800	
4	C				21-100-01	40.000.000	5.725.167	
5	M				21-100-01	17.000.000	1.087.450	
6	S				21-100-01	16.250.000	1.116.100	
7	C				21-100-01	13.500.000	1.462.350	
8	S				21-100-01	10.500.000	210.700	
9	G				21-100-01	11.750.000	319.700	
10	S				21-100-01	10.750.000	242.550	
11	T				21-100-01	12.250.000	510.850	
12	B				21-100-01	16.000.000	891.850	
13	S				21-100-01	13.000.000	619.500	
14	N				21-100-01	7.000.000	100.717	
15	A				21-100-01	6.750.000	34.500	
16	P				21-100-01	7.850.000	103.442	
17	A				21-100-01	6.500.000	40.129	
18	E				21-100-01	6.250.000	47.004	
19	A				21-100-01	7.000.000	64.750	
20	N				21-100-01	7.000.000	28.082	
JUMLAH A						610.700.000	54.654.912	
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.933 ORANG	4.301.062.265	
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.911.762.265	54.654.912

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 10 / 2023

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPH
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
21	D				21-100-01	7.250.000	56.342	
22	AI				21-100-01	6.000.000	16.376	
23	AJ				21-100-01	5.750.000	6.033	
24	DI				21-100-01	7.250.000	85.750	
25	RI				21-100-01	6.500.000	40.129	
26	IV				21-100-01	10.500.000	191.850	
27	M				21-100-01	7.000.000	44.942	
28	DI				21-100-01	5.600.000	35.342	
29	HI				21-100-01	7.250.000	56.717	
30	HE				21-100-01	6.250.000	29.783	
31	MI				21-100-01	6.250.000	28.254	
32	AI				21-100-01	6.750.000	32.967	
33	AJ				21-100-01	7.200.000	55.500	
34	SI				21-100-01	6.500.000	34.533	
35	GI				21-100-01	7.000.000	46.375	
36	SI				21-100-01	6.000.000	55.408	
37	DE				21-100-01	8.250.000	160.233	
38	KL				21-100-01	8.250.000	141.485	
39	AC				21-100-01	7.250.000	74.717	
40	SC				21-100-01	6.250.000	6.564	
JUMLAH A						610.700.000	54.654.912	
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.933 ORANG	4.301.062.265	
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.911.762.265	54.654.912

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 10 / 2023

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPH
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
41	O				21-100-01	5.750.000	6.033	
42	M				21-100-01	6.000.000	16.376	
43	Z				21-100-01	5.750.000	43.533	
44	EI				21-100-01	5.750.000	23.254	
45	FI				21-100-01	6.500.000	40.129	
46	SI				21-100-01	6.500.000	40.129	
47	EI				21-100-01	5.400.000	6.629	
48	BI				21-100-01	5.400.000	6.156	
49	D	USA			21-100-01	5.250.000	19.783	
50	M	ULA			21-100-01	5.400.000	26.908	
51	SI				21-100-01	5.750.000	43.533	
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
JUMLAH A						610.700.000	54.654.912	
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						1.933 ORANG	4.301.062.265	
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							4.911.762.265	54.654.912

Lampiran 12: Bukti Potong Bulan November

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 11 - 2023

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPH
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PENGHASILAN	KODE NEGARA
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
1		N			21-100-01	137.500.000	34.326.533		
2		J			21-100-01	40.000.000	5.431.417		
3		B			21-100-01	19.500.000	1.522.800		
4		O			21-100-01	40.000.000	5.725.167		
5		M			21-100-01	17.000.000	1.087.450		
6		J			21-100-01	16.250.000	1.116.100		
7		C			21-100-01	13.500.000	742.350		
8		S			21-100-01	10.500.000	210.700		
9		G			21-100-01	11.750.000	319.700		
10		S			21-100-01	10.750.000	242.550		
11		T			21-100-01	12.250.000	510.850		
12		B			21-100-01	16.000.000	891.850		
13		S			21-100-01	13.000.000	619.500		
14		N			21-100-01	7.000.000	100.717		
15		A			21-100-01	6.750.000	34.500		
16		P			21-100-01	7.850.000	103.442		
17		A			21-100-01	6.500.000	40.129		
18		E			21-100-01	6.250.000	47.004		
19		A			21-100-01	7.000.000	64.750		
20		M			21-100-01	7.000.000	26.062		
JUMLAH A						610.700.000	54.654.912		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						2.019 ORANG	43.376.302.480		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							43.987.002.480	54.654.912	

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 11 - 2023

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPH
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PENGHASILAN	KODE NEGARA
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
21		D			21-100-01	7.250.000	56.342		
22		A			21-100-01	6.000.000	16.379		
23		A			21-100-01	5.750.000	6.033		
24		D			21-100-01	7.250.000	85.750		
25		R			21-100-01	6.500.000	40.129		
26		E			21-100-01	5.750.000	23.254		
27		S			21-100-01	6.500.000	40.129		
28		S			21-100-01	6.500.000	40.129		
29		E			21-100-01	5.400.000	6.029		
30		B			21-100-01	5.400.000	6.158		
31		D		USL	21-100-01	5.250.000	19.783		
32		M		LILA	21-100-01	5.400.000	29.908		
33		S			21-100-01	5.750.000	43.533		
34		B			21-100-01	10.500.000	191.650		
35		M		JN	21-100-01	7.000.000	44.842		
36		D			21-100-01	5.600.000	35.342		
37		H			21-100-01	7.250.000	56.717		
38		H			21-100-01	6.250.000	29.783		
39		M			21-100-01	6.250.000	28.254		
40		A			21-100-01	6.750.000	32.967		
JUMLAH A						610.700.000	54.654.912		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						2.019 ORANG	43.376.302.480		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							43.987.002.480	54.654.912	

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 11 - 2023

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPH
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PENGHASILAN	KODE NEGARA
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
41		A			21-100-01	7.200.000	55.500		
42		E			21-100-01	6.350.000	34.533		
43		C			21-100-01	7.000.000	46.375		
44		S			21-100-01	6.000.000	55.408		
45		D			21-100-01	8.250.000	160.233		
46		K			21-100-01	8.250.000	141.485		
47		A			21-100-01	7.250.000	74.717		
48		S			21-100-01	6.250.000	9.504		
49		C			21-100-01	5.750.000	6.033		
50		M			21-100-01	6.000.000	16.379		
51		Z			21-100-01	5.750.000	43.533		
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
JUMLAH A						610.700.000	54.654.912		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/LHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						2.019 ORANG	43.376.302.480		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							43.987.002.480	54.654.912	

Lampiran 13: Bukti Potong Bulan Desember

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMNAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 12 / 2023

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPh
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DITONGK (Rp)	KODE NEGARA	KODE BOKORI	
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)						
1		N			21-100-01	137.500.000	36.411.869			
2		J			21-100-01	40.000.000	5.431.415			
3		h			21-100-01	19.500.000	1.522.800			
4		O			21-100-01	40.000.000	5.391.832			
5		M			21-100-01	17.000.000	1.087.450			
6		S			21-100-01	16.250.000	1.116.100			
7		C			21-100-01	13.500.000	2.239.050			
8		S			21-100-01	10.500.000	217.500			
9		G			21-100-01	11.750.000	319.700			
10		S			21-100-01	10.750.000	1.038.750			
11		T			21-100-01	12.250.000	510.850			
12		B			21-100-01	16.000.000	891.850			
13		h			21-100-01	6.250.000	29.787			
14		M			21-100-01	6.250.000	28.256			
15		A			21-100-01	6.750.000	32.963			
16		A			21-100-01	7.200.000	36.750			
17		E			21-100-01	6.350.000	34.537			
18		S			21-100-01	13.000.000	619.800			
19		N			21-100-01	7.000.000	100.713			
20		A			21-100-01	6.750.000	34.560			
JUMLAH A							678.200.000	60.238.339		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						2.008 ORANG	4.392.526.416			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							5.070.726.416	60.238.339		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMNAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 12 / 2023

NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPh
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DITONGK (Rp)	KODE NEGARA	KODE BOKORI	
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)						
21		D			21-100-01	7.850.000	103.438			
22		A			21-100-01	6.500.000	314.531			
23		E			21-100-01	6.250.000	24.247			
24		A			21-100-01	7.000.000	64.750			
25		M			21-100-01	7.000.000	26.088			
26		D			21-100-01	7.250.000	56.338			
27		A			21-100-01	6.000.000	16.381			
28		A			21-100-01	5.750.000	6.037			
29		D			21-100-01	7.250.000	95.750			
30		R			21-100-01	6.500.000	40.131			
31		h			21-100-01	10.500.000	191.650			
32		M			21-100-01	7.000.000	44.838			
33		D			21-100-01	5.000.000	35.338			
34		h			21-100-01	7.250.000	66.713			
35		G			21-100-01	7.000.000	46.375			
36		S			21-100-01	6.000.000	55.412			
37		D			21-100-01	8.250.000	160.237			
38		K			21-100-01	8.250.000	141.440			
39		A			21-100-01	7.250.000	74.713			
40		S			21-100-01	6.250.000	9.566			
JUMLAH A							678.200.000	60.238.339		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						2.008 ORANG	4.392.526.416			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							5.070.726.416	60.238.339		

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMNAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 12 / 2023


NPWP PEMOTONG : 31XXXXXXXXXX

542 000

Lampiran No. 1 - Daftar PPh
Lampiran No. 2 - Daftar Pemotongan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DITONGK (Rp)	KODE NEGARA	KODE BOKORI	
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)						
41		C			21-100-01	6.300.000	32.162			
42		N			21-100-01	6.000.000	16.381			
43		Z			21-100-01	5.750.000	43.537			
44		M			21-100-01	5.750.000	78.400			
45		E			21-100-01	5.750.000	23.256			
46		F			21-100-01	6.500.000	40.131			
47		S			21-100-01	6.500.000	265.131			
48		E			21-100-01	10.800.000	13.260			
49		B			21-100-01	14.650.000	199.195			
50		D			21-100-01	10.500.000	39.570			
51		M			21-100-01	16.200.000	80.728			
52		S			21-100-01	17.250.000	130.603			
53		R			21-100-01	4.750.000	154.250			
54		M			21-100-01	4.750.000	154.250			
55		S			21-100-01	4.750.000	154.250			
56		N			21-100-01	4.750.000	154.250			
57										
58										
59										
60										
JUMLAH A							678.200.000	60.238.339		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIBIN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIBINANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						2.008 ORANG	4.392.526.416			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							5.070.726.416	60.238.339		

Lampiran 14: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Januari



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : 01 - 2023

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBELTULAN KE-

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN :

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :

2. NAMA :

3. ALAMAT :

4. NO. TELEPON :

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	1739	4.389.776.691	53.489.485
2.	PENERIMA PENSILUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKLAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJUAL BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKLAN PEGAWAI YANG MENERIMA BEHALAN YANG BERESIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKLAN PEGAWAI YANG MENERIMA BEHALAN YANG TIDAK BERESIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA PERUSAHAAN KONGSI ATAU DEWAN PANGKAJANG YANG TIDAK MENDANPAK SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MASYARAKAT PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANPAK, BONGSI ATAU BEHALAN LUAR	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSILUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PELAYANAN PERUSAHAAN JAGA PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENSILUN BERKALA SEBAGAI MASA PAJAK LUNAS NEGEDI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJULIHAN ANGIKA 1 S.D. 10)		1739	4.389.776.691	53.489.485
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: <input type="text"/>				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KURANG - ANGKA 14)				53.489.485
LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBELTULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGISIAN DARI ANGKA 15 DAN/ATAU ANGKA 17 YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELTULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 31.345.524.8 - 542 - 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSILUN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMRAN HARI TUA DAN PENSANGON DEWASA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAYAN NEGARA, PEGAWAI NEGEDI SIPIL, ANGGOTA TAMPILAN DAN PENSILUN YANG MENERIMA PENSANGON DAN BEHALAN DAN YANG DIBAYARKAN KEPADA KELUARGA NEGARA/DEWASA	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJULIHAN ANGIKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) <input type="text"/> LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <input type="text"/> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) <input type="text"/> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <input type="text"/> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II <input type="text"/> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHAN BUKTI (PBK) <input type="text"/> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <input type="text"/> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <input type="text"/> LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : <input type="text"/>	
3. NAMA : <input type="text"/>	
4. TANGGAL : <input type="text"/>	
5. TEMPAT : <input type="text"/>	

Lampiran 15: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Februari

	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	area barcode
MASA PAJAK : 02 - 2023	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIREKSI PESISIR)
<input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL	<input type="checkbox"/> SPT PEMBELULAN KE	

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: 00
2. NAMA	: 00
3. ALAMAT	: 00
4. NO. TELEPON	: 00

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	1792	4.412.485.555	53.523.213
2.	PENERIMA PENSUN BERTALUKA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT REPRESENTASIONAL	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT REPRESENTASIONAL	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DINAS KOMISARIAT ATAU DEWAN PENGARAH YANG TIDAK MELAKUKAN JERAGAL PEKERJAAN	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAL PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANPA BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	21-100-99	0	0	0
10.	PELANGAN/PESERTA JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERTALUKA DENGAN MASA PAJAK TERSEBUT	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJULUKAN ANGKA 1 S.D. 10)		1792	4.412.485.555	53.523.213
PENGHUTANGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARIPADA MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy)			0,00	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			0,00	53.523.213
16.	LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBELULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHKAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	0

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 00 31.345.524.8 - 542 . 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LANGSUNG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA/ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBIAYAHAN SEWA/BIAYA DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAJAI/SELISIR/PEKERJA KE SERI/DIRI/ANGGOTA/TAHIL/DIRI DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORIFERUM DAN IMBALAN LAIN YANG TERSEBUTAN KEMUDA KEMUDA KEMUDA KEMUDA	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJULUKAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN


<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 0,00 3 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 0,00 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) 0,00 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V 0,00 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II 0,00 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDBAHLUKUAN (Pbk) 0,00 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III 0,00 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS 0,00 LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMOTONG <input type="checkbox"/> SPT KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 00	
3. NAMA : 00	
4. TANGGAL : 00	
5. TEMPAT : 00	

Lampiran 17: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan April

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</p> <p>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</p>	<p>FORMULIR 1721</p> <p>area barcode</p>
	<p>Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini</p>	
<p>MASA PAJAK : 04 - 2023</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL <input type="checkbox"/> SPT PEMBEUTULAN KE-</p>	<p>JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 000</p>	

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :	00
2. NAMA :	00
3. ALAMAT :	00
4. NO. TELEPON :	00

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOYONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	2084	7.619.515.186	126.761.529
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH BALAN YANG BERSEKUTUWAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH BALAN YANG TIDAK BERSEKUTUWAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DENGAN HONORARIUS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MENYERAP SESUAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MENEMPAH PEGAWAI YANG MENEMPAH JAKSA PRODUK ULTRA TEBAL, BONGKOL ATAU MBLAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESEERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOYONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI PEMERINTAH JAWA PESEERTA KEGIATAN PENERIMA PENSUN BERKALA DENGAN PAJAK BUKAN LUAR NEGARA	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (JENJULAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		2084	7.619.515.186	126.761.529
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
13.	MASA PAJAK :	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12		0,00	0
14.	JUMLAH (ANGKA 10 + ANGKA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 9 - ANGKA 14)			0,00	126.761.529
LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBEUTULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEUTULAN (ANGKA 16 - ANGKA 15)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (0000 - yyyy)			0,00	-

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : 000 31.345.524.8	- 542 - 000	FORMULIR 1721
----------------------------------	-------------	---------------

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOYONG (Rp)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANPAT PENJUALAN TANJUNGAN HARI TUA ATAU JABRAN HARI TUA DAN PENGHASILAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEKASAT NEGARA, PEGAWAI NEGARA SIPIL, ANGGOTA TNPOL DAN PENSUNAN YANG MENEMPAH HONORARIUS DAN MBLAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA NEGARA NEGARA LAIN	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOYONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (JENJULAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 3 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pb) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 000	
3. NAMA : 000	
4. TANGGAL : 00	
5. TEMPAT : 00	

Lampiran 18: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Mei

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

FORMULIR 1721
area barcode

MASA PAJAK : (mm - yyyy) 05 - 2023

SPT NORMAL SPT PEMBELUNGAN KE...

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (mm - yyyy)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :
 2. NAMA :
 3. ALAMAT :
 4. NO. TELEPON :

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAJAWI TETAP	21-100-01	1740	4.326.905.924	54.617.410
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAJAWI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAJAWI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAJAWI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERESIFAT KEPERUSAHAAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAJAWI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERESIFAT KEPERUSAHAAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN HONORARI ATAU DEWAN PENGARAH YANG TIDAK MENYANGGUP SEBAGAI PEGAJAWI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	REKREAN PEGAJAWI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTEN, BOKUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAJAWI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESEERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAJAWI/REKREAN JALAN/PESEERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WALIKU PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		1740	4.326.905.924	54.617.410
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: (Masa Pajak: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12) TAHUN KALENDER (yyyy)				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 - ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				54.617.410
16.	LAKUKAN PENYETORAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBELUNGAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : 31.345.524.8 - 542.000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LANGKAMPAK PENSAK TUKULAN HATI TUKULAN JAMINAN HATI TUKULAN PERSEKUTUAN BERBUDI YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAYAT NEGARA, PEKAJAWI NEGERI, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK NEGARAWA/DEWASA	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 3 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHAN BUKU PAJAK (Ptk) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 000	
3. NAMA : 000	
4. TANGGAL : 00	
5. TEMPAT : 00	

Lampiran 20: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Juli

	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	area barcode
MASA PAJAK : 07 - 2023	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN (DIBERIKAN PETUGAS)
<input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL	<input type="checkbox"/> SPT PEMBELULAN KE...	

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : _____
 2. NAMA : _____
 3. ALAMAT : _____
 4. NO. TELEPON : _____

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	1934	4.754.173.218	54.617.412
2.	PENERIMA PENSULN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJUAL BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMBAH MALKAN YANG BERSEFAT BERPERANMELANGKAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMBAH MALKAN YANG TIDAK BERSEFAT BERPERANMELANGKAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN ADHARIS/ATAU DEWAN PENGARAS YANG TIDAK BERKAWAN DENGAN PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAU PEGAWAI YANG MENEMBAH MALKAN PRODUKSI TANTEM, KONUK ATAU MALKAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSULN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEKERJA JASAPESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSULN BERKALA SEBAGAI PALUK PAJUK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUALAN ANKSA 1 S.D. 10)		1934	4.754.173.218	54.617.412
PENGHTUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
13.	MASA PAJAK : <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="02"/> <input type="text" value="03"/> <input type="text" value="04"/> <input type="text" value="05"/> <input type="text" value="06"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="08"/> <input type="text" value="09"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="12"/>			0,00	0
14.	JUMLAH (ANKSA 12 + ANKSA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANKSA 11 KOLOM E - ANKSA 14)			0,00	54.617.412
LAKSITUM PENGISIAN PADA ANKSA 11 & 17 APABILA SPT PEMBELULAN DAN/ATAU PASAL 26 ANKSA 11 ANKSA 17 LEMBAR DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBUTULKAN (PENGHASILAN BAGIAN 8 ANKSA 15 DARI SPT YANG DIBUTULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELULAN (ANKSA 15 - ANKSA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANKSA 15 ATAU ANKSA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (month - yyyy)			0,00	-

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 31.345.524.8 - 542.000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PENERIMA LUANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LUANG BAYARAN PERIKSA, TUNJANGAN HATI-HATI ATAU JAMINAN HATI-HATI DAN PEMBAYARAN SELING YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAKSANA NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNPOLRI DAN PONDOKAN YANG MENEMBAH HONORARIUM DAN MALKAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA KEJANGKIAN NEGARA/DEBERN	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUALAN ANKSA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN


<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 3 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMKOP/BEKUKAN (PBK) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 313455248	
3. NAMA : _____	
4. TANGGAL : _____	
5. TEMPAT : _____	

Lampiran 21: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Agustus



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : 08 - 2023

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBELULAN KE...

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 002

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 2.881
 2. NAMA : 2.882
 3. ALAMAT : 2.883
 4. NO. TELEPON : 2.884

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	51	610.700.000	54.617.412
2.	PENERIMA PENSUNSI BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKET/ING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUJAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MBALAN YANG TERSEFAT	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MBALAN YANG TIDAK TERSEFAT	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN HONORARIS ATAU DEWAN PENGARAS YANG TIDAK BERKAWAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MINTA PEGAWAI YANG MENEMBAH JASA PRODUKSI, TRAYEK, BONUS ATAU MBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUNSI	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PELAYANAN PERSEORANGAN JAGA PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENSUNSI BERKALA SEBAGAI PAJAK LAIN NEGARA	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		51	610.700.000	54.617.412

JUMLAH (Rp)

12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) 0

13. KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: 0

14. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) 0

15. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) 54.617.412

16. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBUTULKAN (PROSEDUR PENYETORAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBUTULKAN) 0

17. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16) 0

18. KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) -

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 31.345.524.8 - 542.000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUNSI TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HATI TUA DAN PESANGON SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGARA SIPIL ANGGOTA TAMPOLRI DAN PENSUNSI YANG MENERIMA HONORARIUM DAN MBALAN LAIN YANG DIBERIKAN RETRIKA KEUSAHAAN NEGARA/DEMI	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 3 LEMBAR 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR

2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR

3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBK) LEMBAR

4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG


Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. PEMOTONG KUASA

2. NPWP :
 3. NAMA :
 4. TANGGAL :
 5. TEMPAT :

6. TANDA TANGAN :

Lampiran 22: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan September



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : 09 - 2023

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 01

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :
2. NAMA :
3. ALAMAT :
4. NO. TELEPON :

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJUAL BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH IMBALAN YANG BERSEFAT KEPADA PERUSAHAAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH IMBALAN YANG TIDAK BERSEFAT KEPADA PERUSAHAAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN HONORARIUS ATAU DEWAN PENGHARGA YANG TIDAK MENGANGGAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MEMERKA PEGAWAI YANG MENEMPAH JASA PROFESIONAL, INTYEL, BOKRO, ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESEERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEKERJA JALAN PERSEORTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA BERKUALIFIKASI PAJAK LAINNYA	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		0	0	0
PENGHTILANGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: BAGIAN PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (mm)				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 8 - ANGKA 14)				0
LANJUTAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT DIBETULKAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHASILAN BAGIAN B ANGKA 13 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : 31.345.524.8 - 542 - 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSAK, TUNJUKAN HONORIFER, TUNJUKAN JABATAN HONORIFER, DAN MANFAAT LAINNYA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGARA SIPIL, ANGGOTA DPR/DPRD DAN PEKERJA YANG MENEMPAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA KEJARAN NEGARA/DEMI	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN


<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDBAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 000	
3. NAMA : 000	
4. TANGGAL :	
5. TEMPAT :	

Lampiran 23: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Oktober



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

MASA PAJAK : 10 - 2023

101 SPT NORMAL

102 SPT PEMBELUNGAN KE-

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (MELUKAI PETSAS) 000 000

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :	:
2. NAMA :	:
3. ALAMAT :	:
4. NO. TELEPON :	:

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	2004	4.911.762.265	54.654.912
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT KEPERUSAHAAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT KEPERUSAHAAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGARAH YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANUFAKTURER YANG MENERIMA JASA PRODUKSI TANPA MENYERAHKAN KELOMPOK KERJA	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESEERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAJANG/PESERTA JALAN PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI LUAR KAMPUS PESERTA	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (Jumlah dari angka 1 s.d. 10)		2004	4.911.762.265	54.654.912
PENGHUTANGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			3.01	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 301			3.02	0
14.	JUMLAH (angka 12 + angka 13)			3.03	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (angka 11 kolom 6 - angka 14)			3.04	54.654.912
LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBELUNGAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBUTULKAN (PINDAHKAN DARIPADA BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBUTULKAN)			3.05	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELUNGAN (angka 15 - angka 16)			3.06	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			3.07	-

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 31.345.524.8 - 542 - 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA LIANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LIANG MANUFAKTURER, TUJUH BELAS HASIL TERJUAL, JAMBUH DAN TUAH PANGKAS/RESESI DAN/ATAU HASIL TERJUAL BAKULAN	21-401-02	0	0	0
3.	PELAJANG NEGARA, PEGAWAI BEKERJA, ANGGOTA TRIP/BLU DAN PESULUNG YANG MELAKUKAKAN KEGIATAN BERKAWAN/BERKAWAN YANG DIBAYARKAN KEPADA KAWAN/BERKAWAN	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJABAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN


<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 3 LEMBAR</p> <p><input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - II (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR</p> <p><input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - III LEMBAR</p> <p><input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - IV LEMBAR</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - V 1 LEMBAR</p> <p><input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - VI LEMBAR</p> <p><input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pb) LEMBAR</p> <p><input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan meysideri sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KLUASA</p> <p>2. NPWP :</p> <p>3. NAMA :</p> <p>4. TANGGAL :</p> <p>5. TEMPAT :</p>	<p>6. TANDA TANGAN :</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lampiran 25: SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Bulan Desember

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 area barcode
	MASA PAJAK : 12 - 2023 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DARI DUA BELAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	
2. NAMA	
3. ALAMAT	
4. NO. TELEPON	

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	2064	5.070.720.416	60.238.339
2.	PENERIMA PENSILUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJAJ BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKUN PEGAWAI YANG MENEMPAH MAMALAN YANG BERISFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKUN PEGAWAI YANG MENEMPAH MAMALAN YANG TIDAK BERISFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA PERUSAHAAN KONGSI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK BERISFAT SEBAGAI PELAYAN TERAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAL PEGAWAI YANG MENEMPAH JASA PRODUKSI, TANPA BONUS ATAU BERKUALITAS	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSILUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PELAKSANA PEMBIAYAAN JASA SEWA/SEBUTA KEGIATAN PENERIMA PENSILUN BERKALA SEBAGAI PAJAK PULSA LAINNYA	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH PENJUMLAHAN ANGKA 1 s.d. 10)		2064	5.070.720.416	60.238.339
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
KELEBIHAN PENYETORAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
13.	MASA PAJAK :	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12			0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				60.238.339
LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 s.d. 17 APABILA SPT PEMBELUN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPH LEBIH DISETOR					
16.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELUN (ANGKA 13 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				-

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 31.345.524.8 . 542 . 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA LANG PERSORANGAN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LANG MENYAL PENSILUN, TUNJANGAN, HATI TANJAWA JAMBAH HATI TAN DAN PERSORANGAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAKSANA KEGIATAN, PEGAWAI, PEKERJA, ANGGOTA PERUSAHAAN KONGSI DAN PENERIMA LANG KE PERUSAHAAN KONGSI BUKAN BERISFAT YANG BERISFAT KE PERUSAHAAN KONGSI BUKAN BERISFAT	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 s.d. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (Surat Saku Masa Pajak) 3 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - II (Surat Saku Tahun Pajak) 4 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - III 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHAN BUKTI (PBK)
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - VIII 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUNJUK KHUSUS

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG	<input type="checkbox"/> KLUASA	5. TANDA TANGAN:
2. NPWP : 31.345.524.8		
3. NAMA : B		
4. TANGGAL		
5. TEMPAT		

Lampiran 26: Perhitungan PPh 21 Bulan Januari

JANUARI																	
NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Penghasilan Bruto tahunan	Biaya Deduksi	MP tempo tetap (%)	JK persentase (0.3%)	JK persentase (0.24%)	MP tempo tetap (%)	PTKP	Normal PTKP	Penghasilan neto	PPh	PPh Tentukan Tahunan	PPh Tentukan Bulanan	Pembayaran PPh oleh PT/Pejabat	Sisa	Keterangan
1	Aspek Tahunan Rezeki	6.000.000,00	72.000.000,00	3.600.000,00	1.440,00	2.160,00	172.800	720.000,00	K/1	63.000.000,00	68.572.800,00	5.572.800,00	278.440,00	232.200,00	16.379,00	6.841,00	kurang bayar
2	Aspek Aspek Sorek	6.500.000,00	78.000.000,00	3.900.000,00	1.560,00	2.340,00	187.200	780.000,00	K/0	58.300.000,00	74.287.200,00	15.797.200,00	799.240,00	6.297.000,00	40.129,00	26.831,00	kurang bayar
3	Aspek Rezeki	7.500.000,00	90.000.000,00	4.500.000,00	1.800,00	2.700,00	208.800	870.000,00	K/1	63.000.000,00	82.558.800,00	19.558.800,00	992.940,00	8.274,00	7.471,00	8.028,00	kurang bayar
4	Aspek Sorek	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680,00	2.520,00	207.360	840.000,00	K/2	67.500.000,00	82.287.360,00	14.787.360,00	739.348,00	6.161.400,00	74.250,00	112.536,00	kurang bayar
5	Aspek Aspek Sorek	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680,00	2.520,00	207.360	840.000,00	K/1	63.000.000,00	80.001.400,00	12.501.400,00	625.800,00	5.209,00	46.375,00	5.382,00	kurang bayar
6	Aspek Rezeki	6.750.000,00	81.000.000,00	4.050.000,00	1.620,00	2.430,00	194.400	810.000,00	K/2	67.500.000,00	77.144.400,00	9.444.400,00	482.200,00	40.185,00	32.967,00	7.318,00	kurang bayar
7	Aspek Aspek Rezeki	5.750.000,00	69.000.000,00	3.450.000,00	1.380,00	2.070,00	165.600	690.000,00	K/1	63.000.000,00	65.715.600,00	2.715.600,00	135.780,00	11.315,00	6.033,00	5.282,00	kurang bayar
8	Aspek Aspek	6.750.000,00	81.000.000,00	4.050.000,00	1.620,00	2.430,00	194.400	810.000,00	K/2	67.500.000,00	77.144.400,00	9.444.400,00	482.200,00	40.185,00	32.967,00	5.885,00	kurang bayar
9	Aspek Aspek	5.400.000,00	64.800.000,00	3.240.000,00	1.296,00	1.944,00	155.520,00	648.000,00	K/0	58.500.000,00	61.715.520,00	3.215.520,00	167.740,00	13.939,00	8.158,00	5.240,00	kurang bayar
10	Aspek Aspek	16.000.000,00	192.000.000,00	8.000.000,00	3.200,00	4.800,00	460.800,00	1.920.000,00	K/3	72.000.000,00	106.400.000,00	11.161.200,00	930.740,00	891.850,00	38.890,00	38.910,00	kurang bayar
11	Aspek Aspek	13.500.000,00	162.000.000,00	6.750.000,00	2.700,00	4.050,00	388.800	1.620.000,00	K/0	54.000.000,00	156.388.800,00	10.238.800,00	9.538.200,00	779.600,00	746.350,00	33.250,00	kurang bayar
12	Aspek Aspek	7.250.000,00	87.000.000,00	4.350.000,00	1.740,00	2.610,00	208.800	870.000,00	K/2	67.500.000,00	82.558.800,00	15.358.800,00	767.940,00	6.297.000,00	56.240,00	7.653,00	kurang bayar
13	Aspek Aspek	8.250.000,00	99.000.000,00	4.950.000,00	1.980,00	2.970,00	237.600	990.000,00	K/0	58.500.000,00	94.287.400,00	40.287.400,00	2.014.380,00	161.865,00	160.233,00	7.632,00	kurang bayar
14	Aspek Aspek	5.600.000,00	67.200.000,00	3.360.000,00	1.344,00	2.016,00	161.280	672.000,00	K/0	54.000.000,00	64.001.280,00	10.001.280,00	500.640,00	41.627,00	35.340,00	6.287,00	kurang bayar
15	Aspek Aspek	6.350.000,00	76.200.000,00	3.810.000,00	1.524,00	2.286,00	182.880	762.000,00	K/1	63.000.000,00	72.372.880,00	9.572.880,00	478.440,00	39.887,00	34.533,00	5.354,00	kurang bayar
16	Aspek Aspek	5.750.000,00	69.000.000,00	3.450.000,00	1.380,00	2.070,00	165.600	690.000,00	K/1	63.000.000,00	65.715.600,00	2.715.600,00	137.860,00	11.315,00	6.033,00	5.282,00	kurang bayar
17	Aspek Aspek	6.750.000,00	81.000.000,00	4.050.000,00	1.620,00	2.430,00	194.400	810.000,00	K/2	67.500.000,00	77.144.400,00	9.444.400,00	482.200,00	40.185,00	32.967,00	7.318,00	kurang bayar
18	Aspek Aspek	5.750.000,00	69.000.000,00	3.450.000,00	1.380,00	2.070,00	165.600	690.000,00	K/1	63.000.000,00	65.715.600,00	2.715.600,00	137.860,00	11.315,00	6.033,00	5.282,00	kurang bayar
19	Aspek Aspek	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680,00	2.520,00	207.360	840.000,00	K/2	67.500.000,00	80.001.400,00	12.501.400,00	625.800,00	5.209,00	46.375,00	5.315,00	kurang bayar
20	Aspek Aspek	6.250.000,00	75.000.000,00	3.750.000,00	1.500,00	2.250,00	180.000	750.000,00	K/1	63.000.000,00	71.430.000,00	3.930.000,00	196.500,00	16.375,00	14.129,00	2.246,00	kurang bayar
21	Aspek Aspek	10.500.000,00	126.000.000,00	6.000.000,00	2.400,00	3.600,00	302.400	1.260.000,00	K/3	72.000.000,00	103.302.400,00	48.302.400,00	2.415.120,00	191.650,00	191.650,00	9.610,00	kurang bayar
22	Aspek Aspek	19.500.000,00	234.000.000,00	12.000.000,00	4.800,00	7.200,00	561.600	2.340.000,00	K/1	63.000.000,00	228.561.600,00	16.561.600,00	1834.240,00	1.569.520,00	1.522.600,00	48.290,00	kurang bayar
23	Aspek Aspek	40.000.000,00	480.000.000,00	24.000.000,00	9.600,00	14.400,00	1.152.000	4.800.000,00	K/3	72.000.000,00	475.152.000,00	40.152.000,00	492.800,00	581.546,67	5.401.417,00	384.499,67	kurang bayar
24	Aspek Aspek	8.250.000,00	99.000.000,00	4.950.000,00	1.980,00	2.970,00	237.600	990.000,00	K/2	58.500.000,00	94.287.400,00	35.787.400,00	1.789.380,00	1.481.150,00	1.481.150,00	7.240,00	kurang bayar
25	Aspek Aspek	5.850.000,00	70.200.000,00	3.510.000,00	1.404,00	2.106,00	168.480	70.200,00	K/2	67.500.000,00	66.688.480,00	6.617.520,00	327.076,00	2.673,00	-	(26.720,00)	tidak bayar
26	Aspek Aspek	17.000.000,00	204.000.000,00	10.200.000,00	4.080,00	6.120,00	489.600,00	2.040.000,00	K/2	67.500.000,00	198.489.600,00	15.989.600,00	1.348.440,00	1.137.370,00	1.087.450,00	49.920,00	kurang bayar
27	Aspek Aspek	6.000.000,00	72.000.000,00	3.600.000,00	1.440,00	2.160,00	172.800	720.000,00	K/1	63.000.000,00	68.572.800,00	5.572.800,00	278.440,00	232.200,00	16.379,00	6.841,00	kurang bayar
28	Aspek Aspek	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680,00	2.520,00	207.360	840.000,00	K/2	67.500.000,00	80.001.400,00	12.501.400,00	625.800,00	5.209,00	46.375,00	5.315,00	kurang bayar
29	Aspek Aspek	7.500.000,00	90.000.000,00	4.500.000,00	1.800,00	2.700,00	208.800	900.000,00	K/1	63.000.000,00	71.430.000,00	3.930.000,00	196.500,00	16.375,00	14.129,00	2.246,00	kurang bayar
30	Aspek Aspek	10.500.000,00	126.000.000,00	6.000.000,00	2.400,00	3.600,00	302.400	1.260.000,00	K/3	72.000.000,00	103.302.400,00	48.302.400,00	2.415.120,00	191.650,00	191.650,00	9.610,00	kurang bayar
31	Aspek Aspek	19.500.000,00	234.000.000,00	12.000.000,00	4.800,00	7.200,00	561.600	2.340.000,00	K/1	63.000.000,00	228.561.600,00	16.561.600,00	1834.240,00	1.569.520,00	1.522.600,00	48.290,00	kurang bayar
32	Aspek Aspek	40.000.000,00	480.000.000,00	24.000.000,00	9.600,00	14.400,00	1.152.000	4.800.000,00	K/3	72.000.000,00	475.152.000,00	40.152.000,00	492.800,00	581.546,67	5.401.417,00	384.499,67	kurang bayar
33	Aspek Aspek	8.250.000,00	99.000.000,00	4.950.000,00	1.980,00	2.970,00	237.600	990.000,00	K/2	58.500.000,00	94.287.400,00	35.787.400,00	1.789.380,00	1.481.150,00	1.481.150,00	7.240,00	kurang bayar
34	Aspek Aspek	5.850.000,00	70.200.000,00	3.510.000,00	1.404,00	2.106,00	168.480	70.200,00	K/2	67.500.000,00	66.688.480,00	6.617.520,00	327.076,00	2.673,00	-	(26.720,00)	tidak bayar
35	Aspek Aspek	17.000.000,00	204.000.000,00	10.200.000,00	4.080,00	6.120,00	489.600,00	2.040.000,00	K/2	67.500.000,00	198.489.600,00	15.989.600,00	1.348.440,00	1.137.370,00	1.087.450,00	49.920,00	kurang bayar
36	Aspek Aspek	6.000.000,00	72.000.000,00	3.600.000,00	1.440,00	2.160,00	172.800	720.000,00	K/1	63.000.000,00	68.572.800,00	5.572.800,00	278.440,00	232.200,00	16.379,00	6.841,00	kurang bayar
37	Aspek Aspek	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680,00	2.520,00	207.360	840.000,00	K/2	67.500.000,00	80.001.400,00	12.501.400,00	625.800,00	5.209,00	46.375,00	5.315,00	kurang bayar
38	Aspek Aspek	6.000.000,00	72.000.000,00	3.600.000,00	1.440,00	2.160,00	172.800	720.000,00	K/2	67.500.000,00	68.572.800,00	5.572.800,00	278.440,00	232,200	16,379	6,841	kurang bayar
39	Aspek Aspek	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680,00	2.520,00	207.360	840.000,00	K/1	63.000.000,00	80.001.400,00	12.501.400,00	625.800,00	5.209,00	46.375,00	5.315,00	kurang bayar
40	Aspek Aspek	40.000.000,00	480.000.000,00	24.000.000,00	9.600,00	14.400,00	1.152.000	4.800.000,00	K/3	72.000.000,00	475.152.000,00	40.152.000,00	492.800,00	581.546,67	5.401.417,00	384.499,67	kurang bayar
41	Aspek Aspek	6.500.000,00	78.000.000,00	3.900.000,00	1.560,00	2.340,00	187.200	780.000,00	K/1	63.000.000,00	74.287.200,00	11.287.200,00	544.340,00	47.030,00	40.129,00	6.901,00	kurang bayar
42	Aspek Aspek	7.500.000,00	90.000.000,00	4.500.000,00	1.800,00	2.700,00	208.800	900.000,00	K/2	67.500.000,00	82.558.800,00	15.358.800,00	767.940,00	6.297.000,00	56.240,00	7.653,00	kurang bayar
43	Aspek Aspek	6.500.000,00	78.000.000,00	3.900.000,00	1.560,00	2.340,00	187.200	780.000,00	K/1	63.000.000,00	74.287.200,00	11.287.200,00	544.340,00	47.030,00	40.129,00	6.901,00	kurang bayar
44	Aspek Aspek	10.500.000,00	126.000.000,00	6.000.000,00	2.400,00	3.600,00	302.400	1.260.000,00	K/1	63.000.000,00	123.399.600,00	60.399.600,00	3.046.440,00	2.539,00	24.550,00	11.300,00	kurang bayar

Lampiran 28: Perhitungan PPh 21 Bulan Maret

NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Penghasilan Bruto tahunan	Biaya Jabatan (%)	JHT tempo bulanan (%)	JHT tempo tahunan (%)	JKM perusahaannya (0,3%)	JKK perusahaannya (0,54%)	JP tempo bulanan (%)	PTKP	Nominal PTKP	Penghasilan setelah PTKP	PKP	PKP-THT	PKP-THT	PKP-THT	PPh Tarifnya Tahunan	PPh Tarifnya Capaian	Pembayaran PPh oleh PT Capaian	Sisa PPh	Keterangan		
																						PKP-THT	PKP-THT
1	Agustus	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/1	63.000.000	68.728.000	5.728.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Agustus	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/0	63.000.000	74.387.000	15.787.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Agustus	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/1	63.000.000	82.588.000	19.588.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Agustus	7.200.000	86.400.000	4.320.000	1.728.000	2.592.000	207.360	864.000	K/2	63.000.000	82.091.400	19.291.400	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Agustus	8.400.000	100.800.000	5.040.000	2.016.000	2.952.000	244.800	1.008.000	K/1	63.000.000	94.387.000	23.387.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Agustus	6.750.000	81.000.000	4.050.000	1.620.000	2.430.000	194.400	810.000	K/2	63.000.000	77.144.000	18.144.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Agustus	5.750.000	69.000.000	2.875.000	1.150.000	1.725.000	165.600	690.000	K/1	63.000.000	65.715.000	12.715.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	6.750.000	81.000.000	4.050.000	1.620.000	2.430.000	194.400	810.000	K/2	63.000.000	77.144.000	18.144.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Agustus	5.400.000	64.800.000	2.700.000	1.080.000	1.620.000	158.400	648.000	K/0	63.000.000	61.115.200	12.115.200	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Agustus	16.000.000	192.000.000	8.000.000	3.200.000	4.800.000	403.200	1.920.000	K/3	72.000.000	186.400.000	114.400.000	1.161.600	10.907.600	89.185.000	38.910.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
11	Agustus	13.000.000	156.000.000	6.500.000	2.600.000	3.900.000	321.600	1.560.000	Tk/0	54.000.000	156.388.000	102.388.000	935.800	7.984.200	746.350.000	333.110.000	102.388.000	102.388.000	0	0	0	0	
12	Agustus	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	63.000.000	82.588.000	19.588.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
13	Agustus	8.350.000	100.200.000	4.175.000	1.670.000	2.505.000	203.400	900.000	K/1	63.000.000	94.287.000	23.287.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
14	Agustus	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/0	63.000.000	82.588.000	19.588.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
15	Agustus	5.600.000	67.200.000	2.800.000	1.120.000	1.680.000	161.280	672.000	Tk/0	54.000.000	64.021.200	10.021.200	900.000	7.467.200	56.342.000	63.000.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
16	Agustus	5.350.000	64.200.000	2.675.000	1.070.000	1.605.000	151.200	642.000	Tk/0	54.000.000	60.901.200	9.901.200	900.000	7.260.000	56.000.000	63.000.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
17	Agustus	6.350.000	76.200.000	3.175.000	1.260.000	1.905.000	182.880	762.000	K/1	63.000.000	72.378.000	12.378.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
18	Agustus	5.750.000	69.000.000	2.875.000	1.150.000	1.725.000	165.600	690.000	Tk/0	54.000.000	65.715.200	12.715.200	900.000	7.306.200	56.000.000	63.000.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
19	Agustus	5.400.000	64.800.000	2.700.000	1.080.000	1.620.000	158.400	648.000	K/1	63.000.000	61.115.200	12.115.200	900.000	7.398.000	56.000.000	63.000.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
20	Agustus	6.250.000	75.000.000	3.125.000	1.250.000	1.875.000	180.000	750.000	K/2	63.000.000	71.430.000	12.430.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
21	Agustus	6.500.000	78.000.000	3.250.000	1.300.000	1.950.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	80.267.000	13.267.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
22	Agustus	6.500.000	78.000.000	3.250.000	1.300.000	1.950.000	187.200	780.000	K/0	63.000.000	80.267.000	13.267.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
23	Agustus	7.000.000	84.000.000	4.000.000	1.600.000	2.400.000	196.800	840.000	K/1	63.000.000	80.001.000	12.501.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
24	Agustus	11.750.000	141.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	338.400	1.410.000	K/2	63.000.000	135.338.000	47.838.000	478.400	4.376.000	31.700.000	29.280.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
25	Agustus	7.000.000	84.000.000	4.000.000	1.600.000	2.400.000	196.800	840.000	K/1	63.000.000	80.001.000	12.501.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
26	Agustus	6.250.000	75.000.000	3.125.000	1.250.000	1.875.000	180.000	750.000	K/1	63.000.000	71.430.000	12.430.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
27	Agustus	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	63.000.000	82.588.000	19.588.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
28	Agustus	10.500.000	126.000.000	5.250.000	2.100.000	3.150.000	302.400	1.260.000	K/3	72.000.000	120.302.000	48.302.000	483.200	4.376.000	31.700.000	29.280.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
29	Agustus	19.000.000	228.000.000	11.500.000	4.600.000	6.900.000	661.200	2.280.000	K/3	84.000.000	226.511.000	165.511.000	1.834.200	15.649.000	152.260.000	46.920.000	183.240.000	183.240.000	0	0	0	0	
30	Agustus	40.000.000	480.000.000	24.000.000	9.600.000	14.400.000	1.152.000	480.000	K/3	72.000.000	475.152.000	403.152.000	497.800	5.811.667	5.411.667	384.500.000	480.000.000	480.000.000	0	0	0	0	
31	Agustus	8.350.000	100.200.000	4.175.000	1.670.000	2.505.000	203.400	900.000	K/1	63.000.000	94.287.000	23.287.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
32	Agustus	5.850.000	70.200.000	2.925.000	1.170.000	1.755.000	168.480	702.000	K/2	63.000.000	66.858.000	14.158.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
33	Agustus	5.400.000	64.800.000	2.700.000	1.080.000	1.620.000	158.400	648.000	Tk/0	54.000.000	61.115.200	12.115.200	900.000	7.306.200	56.000.000	63.000.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
34	Agustus	17.000.000	204.000.000	10.000.000	4.000.000	6.000.000	576.000	2.040.000	K/3	63.000.000	198.488.000	130.988.000	1.348.400	11.373.000	1.087.450.000	49.000.000	167.840.000	167.840.000	0	0	0	0	
35	Agustus	6.250.000	75.000.000	3.125.000	1.250.000	1.875.000	180.000	750.000	K/1	63.000.000	71.430.000	12.430.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
36	Agustus	6.500.000	78.000.000	3.250.000	1.300.000	1.950.000	187.200	780.000	K/2	63.000.000	80.267.000	13.267.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
37	Agustus	7.000.000	84.000.000	4.000.000	1.600.000	2.400.000	196.800	840.000	K/2	63.000.000	80.001.000	12.501.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
38	Agustus	7.000.000	84.000.000	4.000.000	1.600.000	2.400.000	196.800	840.000	Tk/0	54.000.000	80.001.000	12.501.000	278.400	2.320.000	16.379.000	16.379.000	0	0	0	0	0	0	
39	Agustus	13.750.000	165.000.000	6.875.000	2.750.000	4.125.000	396.000	1.650.000	K/2	63.000.000	147.940.000	18.940.000	408.800	3.508.833	3.428.833	741.300.000	165.000.000	165.000.000	0	0	0	0	
40	Agustus	78.000.000	936.000.000	47.400.000	18.960.000	28.440.000	2.268.000	936.000	K/1	63.000.000	897.168.000	267.168.000	1.338.800	11.137.000	10.442.000	787.500.000	936.000.000	936.000.000	0	0	0	0	
41	Agustus	40.000.000	480.000.000	24.000.000	9.600.000	14.400.000	1.152.000	480.000	K/3	72.000.000	475.152.000	403.152.000											

Lampiran 30: Perhitungan PPH 21 Bulan Mei

NO	BULAN	Penghasilan Bruto bulanan	Penghasilan Bersih bulanan	Bayar Jombang	MEI					PPH Tentatif Tahunan	PPH Tentatif Bulanan	Akhiran PPH dan PPH Optimal	Salah	Keterangan			
					PPH terutang (%)	PPH pemotongan (0,3%)	PK pemotongan (0,5%)	PPH terutang (%)	PTKP						Normal PTKP	Penghasilan neto	PKP
1	Asses Tesek Rezeki	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/1	63.000.000	68.572.800	5.572.800	278.400	16.370	6.841	kurang bayar	
2	Asses Anu Sani	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/0	58.500.000	74.287.200	15.287.200	789.360	40.129	25.831	kurang bayar	
3	Asses Anu Sani	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/1	63.000.000	82.838.800	24.338.800	1.923.400	62.740	8.026	kurang bayar	
4	Asses Sani	7.200.000	86.400.000	4.320.000	1.728.000	2.592.000	207.360	864.000	K/2	67.500.000	83.287.360	14.787.360	739.348	61.140	5.500	6.114	kurang bayar
5	Asses Anu Sani	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.600	840.000	K/1	63.000.000	80.001.600	17.001.600	850.880	70.840	6.470	6.990	kurang bayar
6	Asses Anu Sani	6.750.000	81.000.000	4.050.000	1.620.000	2.430.000	194.400	810.000	K/2	67.500.000	77.144.400	9.444.400	482.200	40.180	5.260	7.180	kurang bayar
7	Asses Anu Sani	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/1	63.000.000	65.716.000	13.576.000	11.310	1.310	6.030	5.280	kurang bayar
8	Asses Anu Sani	6.750.000	81.000.000	4.050.000	1.620.000	2.430.000	194.400	810.000	K/2	67.500.000	77.144.400	9.444.400	482.200	40.180	5.260	5.680	kurang bayar
9	Baku Laksana	16.000.000	192.000.000	8.000.000	3.200.000	4.800.000	460.800	1.920.000	K/3	72.000.000	186.460.800	11.460.800	11.161.200	930.600	81.850	38.910	kurang bayar
11	Casa Mawana	13.500.000	162.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	388.800	1.620.000	K/0	54.000.000	156.388.800	10.238.800	9.238.200	77.860	74.350	33.010	kurang bayar
12	Dava Anu Sani	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	67.500.000	82.838.800	15.338.800	747.940	63.990	56.340	7.650	kurang bayar
13	Dava Mawana	8.250.000	99.000.000	4.950.000	1.980.000	2.970.000	237.600	990.000	K/0	54.000.000	94.287.600	40.287.600	20.143.800	16.786	16.230	7.630	kurang bayar
14	Dava	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/0	58.500.000	82.838.800	24.338.800	1.217.400	101.490	9.270	5.240	kurang bayar
15	Dava Maw W	5.400.000	67.200.000	3.360.000	1.344.000	2.016.000	161.280	672.000	K/0	54.000.000	64.001.280	10.001.280	500.840	41.670	35.340	6.330	kurang bayar
16	Dava Mawana Sani	5.250.000	63.000.000	3.150.000	1.260.000	1.890.000	151.200	630.000	K/0	54.000.000	60.001.200	6.001.200	300.660	25.050	19.780	5.220	kurang bayar
17	Dava Sani	6.350.000	76.200.000	3.810.000	1.524.000	2.286.000	182.880	762.000	K/1	63.000.000	72.572.800	9.572.800	478.440	39.820	34.530	5.550	kurang bayar
18	Ek Anu Sani	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/0	58.500.000	65.716.000	7.216.000	340.780	30.064	22.540	6.811	kurang bayar
19	Ek Sani	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.200	648.000	K/0	58.500.000	61.715.200	3.215.200	1.607.740	1.339	6.420	6.290	kurang bayar
20	Ek Sani Sani	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/2	67.500.000	71.430.000	3.930.000	196.500	16.370	14.070	130.290	lebih bayar
21	Fak Sani	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	47.000	40.129	6.901	kurang bayar
22	Casa Anu Sani	11.750.000	141.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	378.400	1.410.000	K/2	67.500.000	139.391.600	12.501.600	544.360	47.000	40.129	6.901	kurang bayar
23	Casa Ek Pak	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.600	840.000	K/2	67.500.000	80.001.600	12.501.600	625.800	52.000	46.370	5.715	kurang bayar
24	Mawana	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/1	63.000.000	71.430.000	8.430.000	421.200	35.120	29.780	5.340	kurang bayar
25	Mawana Sani	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	67.500.000	82.838.800	15.338.800	747.940	63.990	56.340	7.650	kurang bayar
26	Ikai Anu Sani	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.520.000	3.780.000	302.400	1.260.000	K/3	72.000.000	120.302.400	48.302.400	24.151.200	201.260	191.650	96.010	kurang bayar
27	Ikai Sani	19.500.000	234.000.000	6.000.000	4.800.000	7.200.000	561.600	2.340.000	K/1	63.000.000	228.561.600	16.561.600	18.342.400	1.589.200	1.522.000	49.200	kurang bayar
28	Ikai Sani	40.000.000	480.000.000	6.000.000	9.600.000	14.400.000	1.120.000	480.000	K/3	72.000.000	471.120.000	403.120.000	69.788.000	5.816.667	5.411.770	384.897	kurang bayar
29	Kasa Mawana	8.250.000	99.000.000	4.950.000	1.980.000	2.970.000	237.600	990.000	K/0	54.000.000	94.287.600	40.287.600	20.143.800	16.786	16.230	7.630	kurang bayar
30	Kasa Sani	17.500.000	210.000.000	6.000.000	4.800.000	7.200.000	561.600	2.100.000	K/0	58.500.000	147.940.000	13.894.000	130.894.000	134.480	128.353	741.303	kurang bayar
31	M. Sani Mawana	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.200	648.000	K/0	54.000.000	61.715.200	7.215.200	385.770	321.480	26.900	5.240	kurang bayar
32	Mawana Sani	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.600	840.000	K/1	63.000.000	80.001.600	8.001.600	400.080	333.600	26.900	23.480	kurang bayar
33	Mawana Sani	12.500.000	150.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	378.400	1.500.000	K/2	67.500.000	148.448.400	11.372.000	69.788.000	5.816.667	5.275.167	382.930	kurang bayar
34	Mawana Sani	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/1	63.000.000	71.430.000	8.430.000	421.200	35.120	29.780	5.340	kurang bayar
35	Mawana Sani	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/1	63.000.000	68.572.800	5.572.800	278.400	232.000	16.370	6.841	kurang bayar
36	Mawana Sani	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.600	840.000	K/2	67.500.000	80.001.600	12.501.600	625.800	52.000	46.370	5.715	kurang bayar
37	Mawana Sani	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/2	67.500.000	68.572.800	1.072.800	53.400	4.470	-	4.470	kurang bayar
38	Mawana Sani	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.600	840.000	K/0	54.000.000	80.001.600	26.001.600	130.080	108.340	10.770	7.630	kurang bayar
39	Mawana Sani	17.500.000	210.000.000	6.000.000	4.800.000	7.200.000	561.600	2.100.000	K/0	58.500.000	147.940.000	13.894.000	130.894.000	134.480	128.353	741.303	kurang bayar
40	Okai Sani Mawana	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/1	63.000.000	65.716.000	2.716.000	1.337.800	1.131.500	6.030	5.280	kurang bayar
41	Casa Sani	40.000.000	480.000.000	6.000.000	9.600.000	14.400.000	1.120.000	480.000	K/3	72.000.000	471.120.000	403.120.000	69.788.000	5.816.667	5.275.167	382.930	kurang bayar
42	Pasani	7.850.000	94.200.000	4.710.000	1.884.000	2.826.000	226.800	942.000	K/1	63.000.000	89.740.800	26.740.800	1.335.840	111.310	103.440	7.870	kurang bayar
43	Baku Ek Sani	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	47.000	40.129	6.901	kurang bayar
44	Sani Pasani	10.750.000	129.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	378.400	1.290.000	K/2	67.500.000	129.391.600	12.501.600	544.360	47.000	40.129	6.901	kurang bayar
45	Sani Mawana	13.000.000	156.000.000	6.000.000	3.120.000	4.680.000	374.400	1.560.000	K/1	63.000.000	150.274.400	9.174.400	7.781.140	648.430	612.600	283.930	kurang bayar
46	Sani Ek Mawana	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/0	54.000.000	68.572.800	14.572.800	728.400	60.700	55.400	5.310	kurang bayar
47	Sani Mawana	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	67.500.000	82.838.800	15.338.800	747.940	63.990	56.340	7.650	kurang bayar
48	Sani	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/2	67.500.000	71.430.000	3.930.000	196.500	16.370	14.070	130.290	lebih bayar
49	Sani Sani	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.520.000	3.780.000	302.400	1.260.000	K/2	67.500.000	120.302.400	52.802.400	24.401.200	220.010	210.700	93.010	kurang bayar
50	Sani Sani	18.500.000	219.000.000	6.000.000	4.800.000	7.200.000	561.600	2.190.000	K/2	67.500.000	213.216.000	144.216.000	15.933.800	1.253.200	1.116.000	309.200	kurang bayar
51	Sani	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/0	58.50							

Lampiran 32: Perhitungan PPH 21 Bulan Juli

JULI																		
NO	BUKAN	Penghasilan Bruto	Penghasilan Bruto takbanan	Biaya Jabatan	JHT terutang (%)	JMK persentase (%)	JK persentase (%)	JHT terutang (%)	PPH	Normal PPK	Penghasilan neto	PKP	PPH Terutang Takbanan	PPH Terutang Sisa	Penghasilan PPh s.d. P100 (%)	Sisa	Keterangan	
																		21
1	Aksi Texas Rezeki	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/1	63.000.000	48.572.800	5.572.800	278.400	23.200	16.370	6.841		kurang bayar
2	Aksi Aceh Sakti	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/0	85.000.000	74.287.200	15.787.200	789.360	6.276,00	40.129	25.611		kurang bayar
3	Aksi Bekasi	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/1	63.000.000	82.858.800	19.858.800	929.400	827,50	24.717	8.028		kurang bayar
4	Aksi Sakti	7.000.000	86.400.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	207.360	864.000	K/2	67.500.000	82.837.360	14.787.360	739.380	61,140	55.500	6.114		kurang bayar
5	Aksi Sakti	7.000.000	86.400.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	207.360	864.000	K/1	63.000.000	80.001.400	17.001.400	850.880	708,00	64.750	6.990		kurang bayar
6	Aksi Bekasi	6.750.000	81.000.000	4.050.000	1.620.000	2.430.000	194.400	810.000	K/2	67.500.000	77.144.400	9.444.400	482.200	401,850	52.267	7.318		kurang bayar
7	Aksi Hutan Sakti	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/1	63.000.000	65.715.600	27.15.600	133.780	11.315	6.033	5.282		kurang bayar
8	Aksi Bekasi	6.750.000	81.000.000	4.050.000	1.620.000	2.430.000	194.400	810.000	K/2	67.500.000	77.144.400	9.444.400	482.200	401,850	52.267	7.318		kurang bayar
9	Bekasi Sakti	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.520	648.000	K/0	85.000.000	61.715.520	3.215.520	1.607.740	13,390	6.629	5.240		kurang bayar
10	Bekas Sakti	16.000.000	192.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	1.920.000	K/3	72.000.000	186.460.800	11.460.800	11.161.200	930,600	81.850	389.100		kurang bayar
11	Cekas Mawakani	13.500.000	162.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	1.620.000	Tk/0	54.000.000	156.388.800	10.288.800	9.358.200	779,800	746.350	333.100		kurang bayar
12	Dewa Asa Sakti	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	67.500.000	82.858.800	15.358.800	767.940	639,900	56.340	7.632		kurang bayar
13	Dewa Mawakani	8.250.000	99.000.000	4.950.000	1.980.000	2.970.000	237.600	990.000	Tk/0	54.000.000	94.287.600	40.287.600	2.014.380	167,860	160.233	7.632		kurang bayar
14	Dewa	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/0	85.000.000	94.287.600	35.287.600	1.299.380	109,140	95.750	5.745		kurang bayar
15	Dewa Max W	5.400.000	67.200.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.520	672.000	Tk/0	54.000.000	64.001.280	10.001.280	5.000.640	41,670	35.340	6.330		kurang bayar
16	Dewa PPK Sakti	5.250.000	63.000.000	3.150.000	1.260.000	1.890.000	151.200	630.000	Tk/0	54.000.000	60.001.200	6.001.200	3.000.600	25,000	19.780	5.222		kurang bayar
17	Ewa Sakti	6.350.000	76.200.000	3.810.000	1.524.000	2.286.000	182.880	762.000	K/1	63.000.000	72.572.880	9.572.880	478.440	39,820	34.533	5.554		kurang bayar
18	Ewa Sakti	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/0	85.000.000	65.715.600	7.215.600	340.780	300,640	22.540	6.811		kurang bayar
19	Ewa Sakti	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.520	648.000	K/0	85.000.000	61.715.520	3.215.520	1.607.740	13,390	6.629	5.240		kurang bayar
20	Ewa Sakti	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/2	67.500.000	71.430.000	8.430.000	421.500	351,500	29.780	5.342		kurang bayar
21	Fak Sakti	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	470,000	40.129	6.901		kurang bayar
22	Gewa Asa Sakti	11.750.000	141.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	1.410.000	K/2	67.500.000	133.338.400	67.838.400	4.175.240	347,900	318.700	29.285		kurang bayar
23	Gewa Ewa Sakti	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.400	840.000	K/2	67.500.000	80.001.400	12.501.400	625.880	520,000	46.370	5.715		kurang bayar
24	Hektas	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/1	63.000.000	71.430.000	8.430.000	421.500	351,500	29.780	5.342		kurang bayar
25	Hektas Sakti	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	67.500.000	82.858.800	15.358.800	767.940	639,900	56.340	7.632		kurang bayar
26	Iksi Asa Sakti	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	1.260.000	K/3	72.000.000	120.302.400	48.302.400	2.415.120	201,260	191.650	94.100		kurang bayar
27	Iksi Sakti	19.500.000	234.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	1.950.000	K/1	63.000.000	228.561.600	16.561.600	18.324.240	1.589,500	1.522.000	65.920		kurang bayar
28	Jektas	40.000.000	480.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	480.000	K/3	72.000.000	475.152.000	401.152.000	697.800	581,566	541.417	384.947		kurang bayar
29	Kektas	8.500.000	102.000.000	4.250.000	1.700.000	2.550.000	201.400	102.000	K/2	67.500.000	80.001.400	12.501.400	625.880	520,000	46.370	5.715		kurang bayar
30	Lektas Mawakani	5.850.000	70.200.000	3.510.000	1.404.000	2.106.000	168.480	702.000	K/0	67.500.000	66.538.480	6.615.200	329.760	267,000	22.670	2.673		tidak layak jual
31	M. Sektas Mawakani	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.520	648.000	Tk/0	54.000.000	61.715.520	3.215.520	1.607.740	13,390	6.629	5.240		kurang bayar
32	Mektas Sakti	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.400	840.000	K/3	72.000.000	80.001.400	12.501.400	625.880	520,000	46.370	5.715		kurang bayar
33	Mektas Sakti	17.000.000	204.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	170.000	K/1	63.000.000	198.899.600	130.899.600	13.484.400	1.137,700	1.087.450	49.920		kurang bayar
34	Mektas Sakti	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/2	67.500.000	71.430.000	8.430.000	421.500	351,500	29.780	5.342		kurang bayar
35	Mektas Sakti	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/1	63.000.000	68.572.800	5.572.800	278.400	232,000	16.370	6.841		kurang bayar
36	Mektas Sakti	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.400	840.000	K/2	67.500.000	80.001.400	12.501.400	625.880	520,000	46.370	5.715		kurang bayar
37	Mektas Sakti	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.400	840.000	Tk/0	54.000.000	80.001.400	12.501.400	625.880	520,000	46.370	5.715		kurang bayar
38	Nektas	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	201.400	840.000	K/2	67.500.000	80.001.400	12.501.400	625.880	520,000	46.370	5.715		kurang bayar
39	Nektas	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/0	85.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	470,000	40.129	6.901		kurang bayar
40	Oktas	137.500.000	1.650.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	1.375.000	K/1	63.000.000	1.647.960.000	1.889.460.000	108.380.000	35.089,333	34.288,533	741.300		kurang bayar
41	Oktas	40.000.000	480.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	480.000	K/1	63.000.000	475.152.000	401.152.000	697.800	581,566	541.417	384.947		kurang bayar
42	Pektas	7.850.000	94.200.000	4.710.000	1.884.000	2.826.000	226.800	942.000	K/1	63.000.000	89.716.080	26.716.080	1.335.840	1.131,700	106.440	7.632		kurang bayar
43	Pektas	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	470,000	40.129	6.901		kurang bayar
44	Pektas	10.750.000	129.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	107.500	K/1	63.000.000	123.309.400	60.309.400	3.044.400	253,870	242.550	11.320		kurang bayar
45	Pektas	13.000.000	156.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	130.000	K/0	85.000.000	150.744.000	19.744.000	781.160	648,400	61.960	28.530		kurang bayar
46	Pektas	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/0	85.000.000	68.572.800	5.572.800	278.400	232,000	16.370	6.841		kurang bayar
47	Pektas	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	470,000	40.129	6.901		kurang bayar
48	Pektas	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	286.800	105.000	K/2	67.500.000	120.302.400	48.302.400	2.415.120	201,260	191.650	94.100		kurang bayar
49	Pektas	10.500.000	126.000.000															

Lampiran 34: Perhitungan PPh 21 Bulan September

NO	BULAN	Penghasilan Bruto	Penghasilan Bruto takshasi	Biaya Jabatan	SEPTEMBER										Keterangan		
					MT terutang (%)	MT persentase (0.3%)	JK terutang (0.3%)	JK persentase (0.3%)	PPH	Netorial PPh	Penghasilan neto	PKP	PPH Terutang Takshasi	PPH Terutang Takshasi		Pembayaran PPh oleh PP (Gross)	Selisih
1	Asas Usaha Rezeki	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/1	63.000.000	48.572.800	5.572.800	278.400	16.379	6.841	Kelebihan bayar	
2	Asas Asas Suci	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/0	58.500.000	74.287.200	15.787.200	789.360	6.679	40.129	Kelebihan bayar	
3	Asas Rezeki	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/1	63.000.000	82.858.800	19.858.800	992.400	827.500	7.471	Kelebihan bayar	
4	Asas Asas Suci	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	207.360	840.000	K/2	67.500.000	82.837.360	14.787.360	739.380	55.500	61.140	Kelebihan bayar	
5	Asas Asas Suci	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	207.360	840.000	K/1	63.000.000	80.001.400	17.001.400	850.880	708.600	6.475	Kelebihan bayar	
6	Asas Rezeki	6.750.000	81.000.000	4.050.000	1.620.000	2.430.000	194.400	810.000	K/2	67.500.000	77.144.400	9.444.400	482.200	401.850	7.318	Kelebihan bayar	
7	Asas Usaha Rezeki	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/1	63.000.000	65.715.600	27.15.600	1.337.800	11.31.500	6.033	Kelebihan bayar	
8	Asas Rezeki	6.750.000	81.000.000	4.050.000	1.620.000	2.430.000	194.400	810.000	K/2	67.500.000	77.144.400	9.444.400	482.200	401.850	54.500	Kelebihan bayar	
9	Asas Usaha Rezeki	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.520	648.000	K/0	58.500.000	61.715.520	3.215.520	1.607.740	1.339.800	6.269	Kelebihan bayar	
10	Asas Usaha Rezeki	16.000.000	192.000.000	8.000.000	3.200.000	4.800.000	388.800	1.620.000	K/0	72.000.000	186.460.800	11.460.800	11.161.200	930.760	891.850	389.000	Kelebihan bayar
11	Asas Usaha Rezeki	13.500.000	162.000.000	6.750.000	2.700.000	4.050.000	320.400	1.350.000	K/0	54.000.000	156.388.800	10.288.800	9.358.320	779.860	746.350	333.000	Kelebihan bayar
12	Asas Usaha Rezeki	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	67.500.000	82.858.800	15.358.800	767.940	639.950	56.340	Kelebihan bayar	
13	Asas Usaha Rezeki	8.250.000	99.000.000	4.950.000	1.980.000	2.970.000	237.600	990.000	K/0	54.000.000	94.287.600	40.287.600	2.014.380	167.860	160.233	Kelebihan bayar	
14	Asas Usaha Rezeki	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/0	58.500.000	82.858.800	24.358.800	1.217.940	101.490	9.570	Kelebihan bayar	
15	Asas Usaha Rezeki	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.520	648.000	K/0	54.000.000	64.001.280	10.001.280	500.640	416.720	5.340	Kelebihan bayar	
16	Asas Usaha Rezeki	5.250.000	63.000.000	3.150.000	1.260.000	1.890.000	151.200	630.000	K/0	54.000.000	60.001.200	6.001.200	300.660	250.000	19.780	Kelebihan bayar	
17	Asas Usaha Rezeki	6.350.000	76.200.000	3.810.000	1.524.000	2.286.000	182.880	762.000	K/1	63.000.000	72.572.880	9.572.880	478.440	398.870	54.533	Kelebihan bayar	
18	Asas Usaha Rezeki	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/0	58.500.000	65.715.600	27.15.600	340.780	300.640	6.811	Kelebihan bayar	
19	Asas Usaha Rezeki	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.520	648.000	K/0	58.500.000	61.715.520	3.215.520	1.607.740	1.339.800	6.269	Kelebihan bayar	
20	Asas Usaha Rezeki	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/2	67.500.000	71.430.000	3.930.000	340.780	27.000	304.290	Kelebihan bayar	
21	Asas Usaha Rezeki	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	470.000	401.290	Kelebihan bayar	
22	Asas Usaha Rezeki	11.750.000	141.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	291.600	141.000	K/2	67.500.000	133.338.400	67.838.400	4.173.260	347.980	318.700	29.280	Kelebihan bayar
23	Asas Usaha Rezeki	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	207.360	840.000	K/2	67.500.000	80.001.400	12.501.400	625.880	529.000	48.840	Kelebihan bayar	
24	Asas Usaha Rezeki	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/1	63.000.000	71.430.000	8.430.000	421.500	351.150	29.780	Kelebihan bayar	
25	Asas Usaha Rezeki	7.250.000	87.000.000	4.350.000	1.740.000	2.610.000	208.800	870.000	K/2	67.500.000	82.858.800	15.358.800	767.940	639.950	56.770	Kelebihan bayar	
26	Asas Usaha Rezeki	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.520.000	3.780.000	302.400	1.260.000	K/3	72.000.000	103.302.400	48.302.400	2.415.120	201.260	191.650	Kelebihan bayar	
27	Asas Usaha Rezeki	19.000.000	228.000.000	10.000.000	4.000.000	6.000.000	561.600	2.280.000	K/3	84.000.000	228.561.600	16.561.600	18.342.240	16.982.000	152.260	Kelebihan bayar	
28	Asas Usaha Rezeki	40.000.000	480.000.000	20.000.000	8.000.000	12.000.000	1.152.000	480.000	K/3	72.000.000	475.152.000	403.152.000	49.788.000	581.546.627	5.411.470	384.947	Kelebihan bayar
29	Asas Usaha Rezeki	8.250.000	99.000.000	4.950.000	1.980.000	2.970.000	237.600	990.000	K/0	58.500.000	65.715.600	27.15.600	340.780	300.640	6.811	Kelebihan bayar	
30	Asas Usaha Rezeki	12.500.000	150.000.000	6.250.000	2.500.000	3.750.000	302.400	1.250.000	K/0	58.500.000	147.949.600	1.894.600	420.838.000	35.069.813	34.283.533	741.306	Kelebihan bayar
31	Asas Usaha Rezeki	5.400.000	64.800.000	3.240.000	1.296.000	1.944.000	155.520	648.000	K/0	54.000.000	61.715.520	3.215.520	385.770	321.480	26.900	Kelebihan bayar	
32	Asas Usaha Rezeki	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	207.360	840.000	K/0	72.000.000	80.001.400	8.001.400	400.000	333.400	469.200	Kelebihan bayar	
33	Asas Usaha Rezeki	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/1	63.000.000	71.430.000	8.430.000	421.500	351.150	29.780	Kelebihan bayar	
34	Asas Usaha Rezeki	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/1	63.000.000	68.572.800	5.572.800	278.400	232.000	48.400	Kelebihan bayar	
35	Asas Usaha Rezeki	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	207.360	840.000	K/2	67.500.000	80.001.400	12.501.400	625.880	529.000	48.840	Kelebihan bayar	
36	Asas Usaha Rezeki	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/2	67.500.000	71.430.000	8.430.000	421.500	351.150	29.780	Kelebihan bayar	
37	Asas Usaha Rezeki	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/1	63.000.000	68.572.800	5.572.800	278.400	232.000	48.400	Kelebihan bayar	
38	Asas Usaha Rezeki	7.000.000	84.000.000	4.200.000	1.680.000	2.520.000	207.360	840.000	K/2	67.500.000	80.001.400	12.501.400	625.880	529.000	48.840	Kelebihan bayar	
39	Asas Usaha Rezeki	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	470.000	401.290	Kelebihan bayar	
40	Asas Usaha Rezeki	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.520.000	3.780.000	302.400	1.260.000	K/2	67.500.000	133.338.400	67.838.400	4.173.260	347.980	318.700	29.280	Kelebihan bayar
41	Asas Usaha Rezeki	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.520.000	3.780.000	302.400	1.260.000	K/0	58.500.000	150.374.400	9.174.400	7.781.140	6.484.800	619.600	283.900	Kelebihan bayar
42	Asas Usaha Rezeki	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/0	54.000.000	68.572.800	14.572.800	728.400	607.200	56.400	Kelebihan bayar	
43	Asas Usaha Rezeki	6.500.000	78.000.000	3.900.000	1.560.000	2.340.000	187.200	780.000	K/1	63.000.000	74.287.200	11.287.200	564.360	470.000	401.290	Kelebihan bayar	
44	Asas Usaha Rezeki	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.520.000	3.780.000	302.400	1.260.000	K/1	63.000.000	150.374.400	9.174.400	7.781.140	6.484.800	619.600	283.900	Kelebihan bayar
45	Asas Usaha Rezeki	6.250.000	75.000.000	3.750.000	1.500.000	2.250.000	180.000	750.000	K/2	67.500.000	71.430.000	3.930.000	340.780	163.500	9.500	Kelebihan bayar	
46	Asas Usaha Rezeki	6.000.000	72.000.000	3.600.000	1.440.000	2.160.000	172.800	720.000	K/2	67.500.000	71.430.000	3.930.000	340.780	163.500	9.500	Kelebihan bayar	
47	Asas Usaha Rezeki	10.500.000	126.000.000	6.000.000	2.520.000	3.780.000	302.400	1.260.000	K/2	67.500.000	103.302.400	52.802.400	2.440.120	2.001.000	210.700	Kelebihan bayar	
48	Asas Usaha Rezeki	18.500.000	222.000.000	9.250.000	3.700.000	5.550.000	526.400	2.250.000	K/2	67.500.000	213.252.000	14.025.000	15.903.400	13.253.000	11.116.000	209.200	Kelebihan bayar
49	Asas Usaha Rezeki	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/0	58.500.000	65.715.600	27.15.600	340.780	300.640	6.811	Kelebihan bayar	
50	Asas Usaha Rezeki	14.000.000	168.000.000	7.000.000	2.800.000	4.200.000	331.200	1.400.000	K/0	54.000.000	161.332.800	87.332.800	7.102.920	591.900	510.880	Kelebihan bayar	
51	Asas Usaha Rezeki	5.750.000	69.000.000	3.450.000	1.380.000	2.070.000	165.600	690.000	K/0	54.000.000	65.715.600						

Lampiran 36: Perhitungan PPh 21 Bulan November

NOVEMBER																			
No	BULAN	Penghasilan Berkas/Non Berkas	Penghasilan Bruto - Diskon	Biaya - Jabatan	Net Income - K/L	JM persentase - 25%	JK persentase - 25%	# Persentase - 25%	PPH	Normal PPh	Penghasilan - net	PPH	PPH Tertunggak	PPH Tertunggak - Balance	Penjumlahan PPh - oleh P. Contrib	Sisa	Keterangan		
1	Agus Tahun Berakhir	6.000.000,00	72.000.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00	172.800,00	720.000,00	K/1	63.000.000,00	82.588.800,00	15.388.800,00	278.400,00	232.200,00	6.379,00	6.841,00	kurang bayar		
2	Agus Agas Selesai	6.500.000,00	78.000.000,00	3.900.000,00	1.560.000,00	2.340.000,00	187.200,00	780.000,00	K/0	58.500.000,00	74.287.200,00	15.787.200,00	789.360,00	657.840,00	40.129,00	25.831,00	kurang bayar		
3	Agus Berakhir	7.250.000,00	87.000.000,00	4.350.000,00	1.740.000,00	2.610.000,00	208.800,00	870.000,00	K/1	63.000.000,00	82.588.800,00	15.388.800,00	992.940,00	827.540,00	7.471,00	8.028,00	kurang bayar		
4	Agus Selesai	7.200.000,00	86.400.000,00	4.320.000,00	1.728.000,00	2.592.000,00	207.360,00	864.000,00	K/2	67.500.000,00	82.287.360,00	14.787.360,00	739.380,00	611.640,00	11.740,00	6.114,00	kurang bayar		
5	Agus Agas Selesai	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680.000,00	2.520.000,00	201.600,00	840.000,00	K/1	63.000.000,00	80.001.600,00	17.001.600,00	850.080,00	708.640,00	6.475,00	6.900,00	kurang bayar		
6	Agus Berakhir	6.750.000,00	81.000.000,00	4.050.000,00	1.620.000,00	2.430.000,00	194.400,00	810.000,00	K/2	67.500.000,00	77.144.400,00	9.444.400,00	482.220,00	401.850,00	32.967,00	7.218,00	kurang bayar		
7	Agus Agas Selesai	5.750.000,00	69.000.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00	165.600,00	690.000,00	K/1	63.000.000,00	65.715.600,00	2.715.600,00	135.840,00	113.150,00	2.694,00	5.885,00	kurang bayar		
8	Agus Berakhir	6.750.000,00	81.000.000,00	4.050.000,00	1.620.000,00	2.430.000,00	194.400,00	810.000,00	K/2	67.500.000,00	77.144.400,00	9.444.400,00	482.220,00	401.850,00	32.967,00	7.218,00	kurang bayar		
9	Agus Selesai	5.400.000,00	64.800.000,00	3.240.000,00	1.296.000,00	1.944.000,00	155.200,00	648.000,00	K/0	58.500.000,00	61.715.200,00	3.215.200,00	160.776,00	133.980,00	26.796,00	5.340,00	kurang bayar		
10	Agus Berakhir	16.000.000,00	192.000.000,00	8.000.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00	480.000,00	1.920.000,00	K/3	72.000.000,00	186.440.800,00	11.440.800,00	11.149.200,00	930.760,00	891.850,00	38.910,00	kurang bayar		
11	Okta Berakhir	13.500.000,00	162.000.000,00	6.750.000,00	2.700.000,00	4.050.000,00	388.800,00	1.575.000,00	K/0	54.000.000,00	156.388.800,00	10.288.800,00	928.320,00	779.880,00	14.440,00	33.010,00	kurang bayar		
12	Okta Agas Selesai	7.250.000,00	87.000.000,00	4.350.000,00	1.740.000,00	2.610.000,00	208.800,00	870.000,00	K/2	67.500.000,00	82.588.800,00	15.388.800,00	747.940,00	634.990,00	110.950,00	7.633,00	kurang bayar		
13	Okta Berakhir	8.250.000,00	99.000.000,00	4.950.000,00	1.980.000,00	2.970.000,00	237.600,00	990.000,00	K/0	54.000.000,00	94.287.600,00	40.287.600,00	201.438,00	167.864,00	160.233,00	7.632,00	kurang bayar		
14	Okta Selesai	7.250.000,00	87.000.000,00	4.350.000,00	1.740.000,00	2.610.000,00	208.800,00	870.000,00	K/2	67.500.000,00	82.588.800,00	15.388.800,00	747.940,00	634.990,00	110.950,00	7.633,00	kurang bayar		
15	Okta Agas Selesai	5.250.000,00	63.000.000,00	3.150.000,00	1.260.000,00	1.890.000,00	151.200,00	630.000,00	K/0	54.000.000,00	60.001.200,00	6.001.200,00	300.060,00	250.060,00	1.978,00	5.022,00	kurang bayar		
16	Okta Berakhir	6.350.000,00	76.200.000,00	3.810.000,00	1.524.000,00	2.286.000,00	182.880,00	762.000,00	K/1	63.000.000,00	72.727.880,00	9.572.880,00	478.440,00	398.870,00	5.533,00	5.534,00	kurang bayar		
17	Okta Selesai	5.750.000,00	69.000.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00	165.600,00	690.000,00	K/0	58.500.000,00	65.715.600,00	2.715.600,00	360.780,00	306.060,00	23.250,00	4.811,00	kurang bayar		
18	Okta Agas Selesai	5.400.000,00	64.800.000,00	3.240.000,00	1.296.000,00	1.944.000,00	155.200,00	648.000,00	K/0	58.500.000,00	61.715.200,00	3.215.200,00	160.776,00	133.980,00	26.796,00	5.340,00	kurang bayar		
19	Okta Berakhir	6.350.000,00	75.000.000,00	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	180.000,00	750.000,00	K/2	67.500.000,00	71.430.000,00	3.930.000,00	196.500,00	163.750,00	47.000,00	106.429,00	lebih bayar		
20	Okta Selesai	6.500.000,00	78.000.000,00	3.900.000,00	1.560.000,00	2.340.000,00	187.200,00	780.000,00	K/1	63.000.000,00	74.287.200,00	11.287.200,00	544.340,00	470.000,00	40.129,00	6.901,00	kurang bayar		
21	Okta Agas Selesai	11.500.000,00	141.000.000,00	6.000.000,00	2.820.000,00	4.230.000,00	338.400,00	1.410.000,00	K/2	67.500.000,00	135.338.400,00	47.838.400,00	4.752.840,00	3.978.800,00	31.700,00	29.260,00	kurang bayar		
22	Okta Berakhir	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680.000,00	2.520.000,00	201.600,00	840.000,00	K/2	67.500.000,00	80.001.600,00	12.501.600,00	625.080,00	529.000,00	46.370,00	57.150,00	kurang bayar		
23	Okta Selesai	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680.000,00	2.520.000,00	201.600,00	840.000,00	K/2	67.500.000,00	80.001.600,00	12.501.600,00	625.080,00	529.000,00	46.370,00	57.150,00	kurang bayar		
24	Okta Agas Selesai	6.250.000,00	75.000.000,00	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	180.000,00	750.000,00	K/1	63.000.000,00	71.430.000,00	3.430.000,00	421.500,00	351.150,00	28.250,00	4.871,00	kurang bayar		
25	Okta Berakhir	7.250.000,00	87.000.000,00	4.350.000,00	1.740.000,00	2.610.000,00	208.800,00	870.000,00	K/2	67.500.000,00	82.588.800,00	15.388.800,00	747.940,00	634.990,00	110.950,00	7.633,00	kurang bayar		
26	Okta Selesai	10.500.000,00	126.000.000,00	6.000.000,00	2.520.000,00	3.780.000,00	302.400,00	1.260.000,00	K/3	72.000.000,00	120.302.400,00	48.302.400,00	2.415.200,00	2.012.600,00	191.600,00	96.010,00	kurang bayar		
27	Okta Agas Selesai	19.500.000,00	234.000.000,00	11.700.000,00	4.680.000,00	7.020.000,00	561.600,00	2.340.000,00	K/1	63.000.000,00	228.561.600,00	16.561.600,00	18.324.240,00	1.569.200,00	1.522.600,00	46.900,00	kurang bayar		
28	Okta Berakhir	40.000.000,00	480.000.000,00	24.000.000,00	9.600.000,00	14.400.000,00	1.152.000,00	4.800.000,00	K/3	72.000.000,00	475.152.000,00	40.152.000,00	69.788.000,00	58.156.667,00	5.411.417,00	384.209,00	kurang bayar		
29	Okta Selesai	8.200.000,00	99.000.000,00	4.950.000,00	1.980.000,00	2.970.000,00	237.600,00	990.000,00	K/0	58.500.000,00	94.287.600,00	35.787.600,00	1.789.260,00	1.488.000,00	75.600,00	75.600,00	kurang bayar		
30	Okta Agas Selesai	5.750.000,00	69.000.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00	165.600,00	690.000,00	K/2	67.500.000,00	65.715.600,00	2.715.600,00	178.440,00	145.800,00	28.830,00	5.885,00	kurang bayar		
31	Okta Berakhir	7.000.000,00	84.000.000,00	4.200.000,00	1.680.000,00	2.520.000,00	201.600,00	840.000,00	K/2	67.500.000,00	80.001.600,00	12.501.600,00	625.080,00	529.000,00	46.370,00	57.150,00	kurang bayar		
32	Okta Selesai	17.000.000,00	204.000.000,00	10.000.000,00	4.080.000,00	6.120.000,00	489.600,00	1.710.000,00	K/2	67.500.000,00	198.489.600,00	70.189.600,00	13.448.400,00	11.377.200,00	1.087.450,00	49.250,00	kurang bayar		
33	Okta Agas Selesai	6.000.000,00	72.000.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00	172.800,00	720.000,00	K/0	54.000.000,00	60.369.600,00	6.369.600,00	314.400,00	262.800,00	51.600,00	5.312,00	kurang bayar		
34	Okta Berakhir	6.500.000,00	78.000.000,00	3.900.000,00	1.560.000,00	2.340.000,00	187.200,00	780.000,00	K/1	63.000.000,00	74.287.200,00	11.287.200,00	544.340,00	470.000,00	40.129,00	6.901,00	kurang bayar		
35	Okta Selesai	10.500.000,00	126.000.000,00	6.000.000,00	2.520.000,00	3.780.000,00	302.400,00	1.260.000,00	K/2	67.500.000,00	120.302.400,00	48.302.400,00	2.415.200,00	2.012.600,00	191.600,00	96.010,00	kurang bayar		
36	Okta Agas Selesai	18.250.000,00	219.000.000,00	9.125.000,00	3.650.000,00	5.475.000,00	432.000,00	1.710.000,00	K/1	63.000.000,00	213.225.000,00	52.800,00	1.460.250,00	1.260.000,00	200.250,00	9.310,00	kurang bayar		
37	Okta Berakhir	6.350.000,00	75.000.000,00	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	180.000,00	750.000,00	K/2	67.500.000,00	71.430.000,00	3.930.000,00	196.500,00	163.750,00	47.000,00	106.429,00	kurang bayar		
38	Okta Selesai	6.500.000,00	78.000.000,00	3.900.000,00	1.560.000,00	2.340.000,00	187.200,00	780.000,00	K/1	63.000.000,00	74.287.200,00	11.287.200,00	544.340,00	470.000,00	40.129,00	6.901,00	kurang bayar		
39	Okta Agas Selesai	18.250.000,00	219.000.000,00	9.125.000,00	3.650.000,00	5.475.000,00	432.000,00	1.710.000,00	K/2	67.500.000,00	213.225.000,00	52.800,00	1.460.250,00	1.260.000,00	200.250,00	9.310,00	kurang bayar		
40	Okta Berakhir	5.750.000,00	69.000.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00	165.600,00	690.000,00	K/0	58.500.000,00	65.715.600,00	2.715.600,00	360.780,00	306.060,00	23.250,00	4.811,00	kurang bayar		
41	Okta Selesai	12.250.000,00	147.000.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	283.200,00	1.125.000,00	K/1	63.000.000,00	141.352.800,00	87.352.800,00	7.102.920,00	5.911.000,00	510.800,00	81.560,00	kurang bayar		
42	Okta Agas Selesai	5.750.000,00	69.000.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00	165.600,00	690.000,00	K/0	54.000.000,00	65.715.600,00	2.715.600,00	360.780,00	306.060,00	23.250,00	4.811,00	kurang bayar		